



LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH TAHUN 2024



BADAN KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK DAERAH PROVINSI

SULAWESI TENGAH

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah dan karuniaNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2024 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan salah satu unsur dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2024 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

Dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Perjanjian Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dokumen LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah selain sebagai kewajiban tersebut di atas juga dimaksudkan untuk :

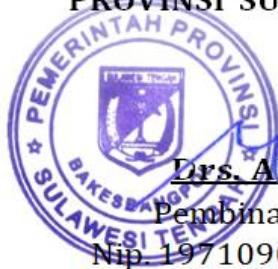
1. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian dokumen LKjIP kami sampaikan, semoga dokumen LKjIP

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Palu. 30 Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. ARFAN, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 197109091990121001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 dimaksudkan untuk menginformasikan Capaian Kinerja tahun 2024 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang merupakan bentuk komitmen penuh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, memiliki tugas untuk mencapai tujuan *“Mewujudkan Kondusifitas Daerah melalui Penguatan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (IPOLEKSOSBUD)”* dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu :

1. Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Meningkatnya Penerapan hasil pembinaan, Kebebasan, Kesenjangan dan Kapasitas lembaga Demokrasi.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui pelaksanaan 6 (enam) Program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Dalam merealisasikan sasaran tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menggunakan dana sebesar Rp. 121.581.920.704,- atau 98% dari pagu anggaran sebesar Rp. 124.013.959.017.86,- yang bersumber dari DPA Perubahan Nomor: DPPA/A.4/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 05 Desember 2024.

DAFTAR ISI

Halaman Juduli

Kata Pengantar ii

Ringkasan Eksekutif.....iv

Daftar isi.....v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Cascading Kinerja 2

1.2. Tugas, Fungsi da Struktur Organisasi..... 3

1.3. Isu-isu Strategis 5

1.4. Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana.....6

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 11

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.. 11

2.2 Srategi dan Arah Kebijakan11

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024 13

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) 39

2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 39

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA 41

3.1. Capaian Kinerja 41

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini..... 41

b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir 43

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi..... 44

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional 45

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 46

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 49

g. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja..... 50

3.2. Realisasi Anggaran..... 70

3.3. Inovasi 106

3.4. Penghargaan 112

BAB. IV PENUTUP..... 113

4.1. Kesimpulan Umum..... 113

4.2. Saran..... 113

Lampiran :

- Perjanjian kinerja
- Dokumentasi Kegiatan

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2023 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

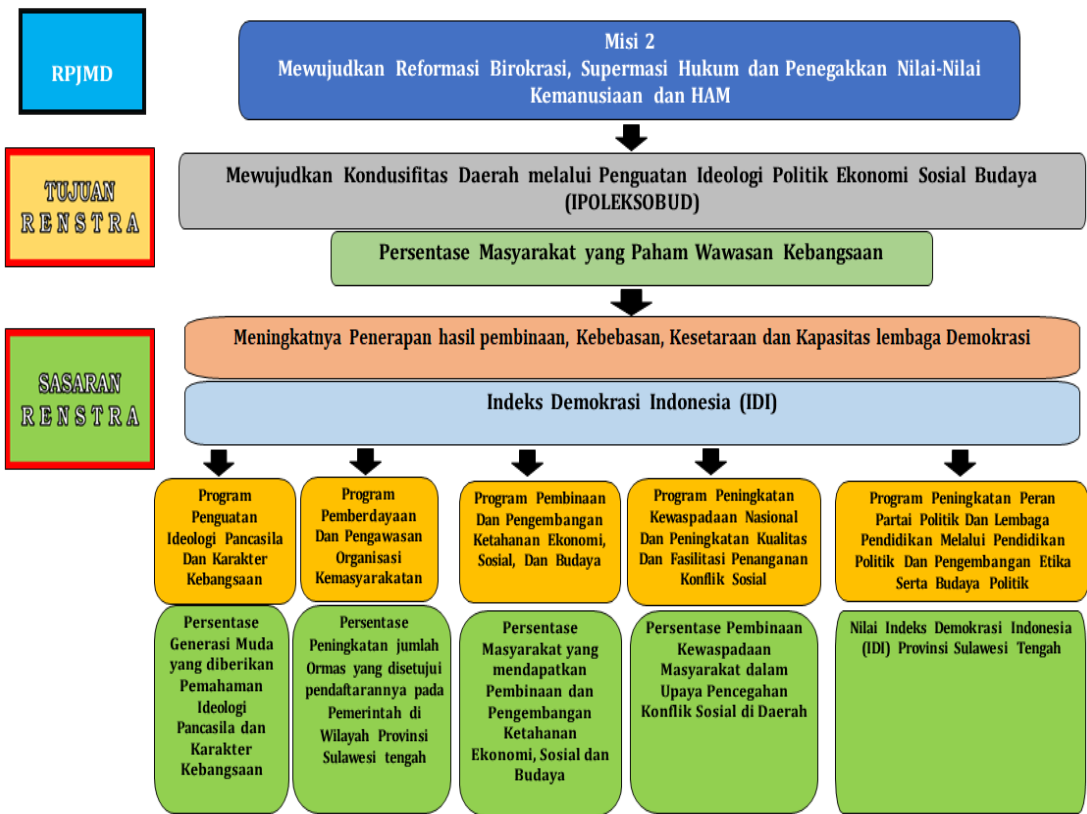
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pegganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

- Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2013 tentang uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

1.1 Cascading Kinerja

Dalam penentuan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Sulawesi Tengah, disusun Cascading (pohon kinerja) yang merupakan sebuah proses penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah, serta tujuan dan sasaran pembangunan kedalam Tujuan, Sasaran, dan Program Perangkat Daerah dengan menggunakan kerangka logis sehingga menjadi lebih rinci dan terbagi habis. Dengan kata lain adanya Cascading tersebut, tumpang tindih tugas dan kewenangan pada setiap jenjang jabatan dapat dihindari. Adapun Cascading Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1 Cascading Badan Krsatuan Bangsa dan Politik Daerah



1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Sulawesi Tengah merupakan salah satu Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Fasilitasi dan pelaksanaan tugas di Bidang Ideologi dan Kewaspadaan. Ketahanan Ekonomi dan Politik Dalam Negeri lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Pemantauan. Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Pelaksanaan Kesekretariatan Badan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Beberapa kewenangan yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sehubungan dengan penyelenggaraan fungsi tersebut di atas adalah :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kewaspadaan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Politik;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Seni. Budaya. Agama dan Kemasyarakatan;
- e. Penyiapan bahan Evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- f. Memberikan pelayanan administrasi meliputi Perencanaan Program. Keuangan dan Asset serta Kepegawaian dan Umum.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam pelaksanaan program/kegiatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Sulawesi Tengah telah mengembangkan Kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Organisasi Perempuan dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman kerja sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Struktur organisasi merupakan instrumen utama yang perlu dimiliki setiap OPD dalam menjalankan roda pembangunan, dengan dimilikinya struktur organisasi maka setiap kegiatan yang akan dan telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dikepalai oleh seorang Kepala Badan yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub. Bagian dan 4 (empat) Bidang yang membawahi 8 (delapan) Sub. Bidang dengan susunan organisasi sebagaimana terlihat pada Bagan Struktur Organisasi Badan sesuai dengan lampiran VII Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri dari:

Gambar 1.2 Struktur Organisasi



1.3 Isu-isu Strategis.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan telah dapat berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari target pelaksanaan kegiatan. Namun ada beberapa kendala/permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target kinerja antara lain :

1. Masih rendahnya Implementasi Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (IPOLEKSOSBUD) di lingkungan Masyarakat;
2. Kondisi objektif alamiah dan wilayah Sulawesi Tengah dengan kemajemukan suku, etnis, agama, budaya serta kondisi geografis dengan kandungan kekayaan alamnya yang tidak merata;
3. Kehidupan politik yang belum sepenuhnya demokratis serta masih terdapatnya kecenderungan untuk melakukan berbagai bentuk rekayasa politik;
4. Kebijakan pembangunan ekonomi yang belum mampu menciptakan pemerataan antar daerah;
5. Lunturnya semangat nasionalisme dan patriotisme;
6. Lunturnya pemahaman dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional pada masyarakat.

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Telaahan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Telaahan Renstra Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2019-2024 maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah untuk 5 (lima) Tahun ke depan, yaitu:

- a. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
- b. Pemenuhan SDM dan anggaran yang memadai;
- c. Optimalisasi Deteksi dan Kewaspadaan Dini terhadap Potensi Instabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum;
- d. Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Ideologi Pancasila dan Kewaspadaan Nasional, Pembauran Kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan Ketahanan Ekonomi , Politik, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- e. Penguatan peran Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah dalam memberikan Pendidikan Politik bagi

Masyarakat;

- f. Optimalisasi peran dan Fasilitas Forum dan Lembaga Kemitraan

1.4 Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai dan status Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah sampai Bulan Desember 2024 sebanyak 115 orang, Jumlah tersebut terdiri dari 45 orang Pegawai Negeri Sipil, 70 orang Tenaga kontrak. Dari 115 orang pegawai tersebut, sebanyak 68 orang laki-laki dan 47 orang perempuan dengan data sebagai berikut:.

- a. Status Pendidikan dan Golongan Kepegawaian

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 45 orang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah, sebanyak 9 orang berpendidikan strata 2 (pasca sarjana), 22 orang berpendidikan strata 1 (sarjana), 1 orang berpendidikan Diploma III, 12 orang berpendidikan SLTA, 1 orang berpendidikan SLTP, dan tidak ada Pegawai berpendidikan SD.

Tabel 2.1
Daftar Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Pendidikan
(Data Bulan Desember 2024) :

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Strata 3	-
Strata 2	9
Strata 1	22
Diploma 3	1
SLTA	12
SLTP	1
SD	-
Total	45

- b. Golongan Kepegawaian

Sedangkan berdasarkan Gol. Kepegawaian, dari 46 orang Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Gol. II 12 orang; Gol. III 23 orang ; Gol. IV 11 orang.

Tabel 2.2
Daftar Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Menurut kepangkatan
(Data Bulan Desember 2024) :

Pangkat/golongan	Jumlah
Golongan I	-
Golongan II	11
Golongan III	23
Golongan IV	11
Total	45

2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai asset/modal, yang terdiri dari :

Tabel 2.3
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA
(Data Bulan Desember 2024) :

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Bangunan Gedung	1	Gedung
	Alat-alat Angkutan	44	Unit
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	12	Unit
2	Pick Up	1	Unit
3	Sepeda Motor	31	Unit
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	378	Buah
No	Jenis Barang	Jumlah	Jumlah
1	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1	Buah
2	Lemari Besi	8	Buah
3	Filling Besi/Metal	2	Buah
4	Brand Kas	2	Buah
5	Lemari kayu	0	Buah
6	Mesin Absensi	1	Buah
7	Alat Kantor Lainnya	1	Buah
8	Kursi Besi/Metal	0	Buah
9	Meja Rapat	17	Buah
10	Kursi Rapat	80	Buah

No	Jenis Barang	Jumlah	Jumlah
11	Kursi Tamu	4	Buah
12	Meja Komputer	0	Buah
13	Tenda	0	Buah
14	Meja Biro	30	Buah
15	Sofa	1	Buah
16	Kursi Kerja	50	Buah
17	Gordyn	0	Buah
18	Karpet	0	Buah
19	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	2	Buah
20	Lemari Es	1	Buah
	AC Split	21	Buah
21	Dispenser	13	Buah
22	Televisi	6	Buah
23	Loudspeaker	1	Buah
24	Sound System	1	Buah
25	Handy Cam	0	Buah
26	Tripot Speaker	1	Buah
27	P.C Unit/ Komputer PC	32	Buah
28	Laptop	23	Buah
29	Note Book	15	Buah
30	Printer	23	Buah
31	Scanner	14	Buah
32	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah
33	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Buah
34	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	Buah
35	Meja Operator	0	Buah
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	0	Buah
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	Buah
39	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	0	Buah
40	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	0	Buah
41	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	0	Buah
42	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3	Buah
43	Meja Reception	1	Buah
44	Projektor/Infocus	2	Buah
45	Running Text	1	Buah
46	Telephone mobile	2	Buah
No	Jenis Barang	Jumlah	Jumlah
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	8	46 Buah
1	Microphone/Wireless Mic	1	Buah
2	Microphone Table stand	2	Set
3	Camera Electronic	2	Buah
4	Camera Film	1	Buah

No	Jenis Barang	Jumlah	Jumlah
5	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	2	Buah
6	Facsimile	0	Buah
7	Alat Komunikasi Radio VHF Lain-lain	0	Buah
8	Alat Pemancar VHF/FM Lain-lain	0	Buah
9	Antena VHF/FM Portable	0	Buah
10	Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain	0	Buah

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Evaluasi AKIP tahun 2023

Berdasarkan Surat Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 700.1.2.1/084/LHP-E-AKIP/PROV/IRBAN1/2024 Tanggal 24 Juni 2024, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh Skor 80,10 Sehingga mendapat predikat A (nilai >80-90) dengan interprestasi MEMUASKAN.

Hasil Evaluasi (LHE) Akunabilitas Kinerja Pemerinah (AKIP) Tahun 2023 dan Tahun 2024, direkomendasikan agar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawei tengah Melakukan perbaikan sebagai berikut:

Tabel 1.5 Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP 2023

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
1	2	3
1.	Melakukan perbaikan terhadap dokumen perencanaan agar memuat data kinerja yang andal dan relevan sebagai alat ukur dalam capaian indikator kinerja sesuai dengan IKU yang ditetapkan dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Melalui Desk Arsitektur Kinerja
2.	Melaksanakan monitoring secara berkala dan berjenjang atas pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dalam mencapai kinerja efektif dan efisien	Rapat evaluasi capaian kinerja tahun 2024
3.	Mendorong agar melakukan teknik pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja serta evaluasi kinerja menggunakan teknologi informasi (aplikasi) yang akuntabel	Rapat evaluasi capaian kinerja tahun 2024

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
1	2	3
4.	Melakukan perbaikan pada dokumen laporan kinerja dimana belum sepenuhnya mengungkap seluruh informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja dengan melakukan koordinasi pada Stakeholder terkait dalam permintaan data realisasi capaian kinerja.	Rapat evaluasi capaian kinerja dan koordinasi antar bidang lingkup Bakesbangpol Prov. Sulteng tahun 2024
4.	Mendorong agar semua unsur pimpinan memahami dan peduli, dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan	Rapat evaluasi capaian kinerja dan koordinasi antar bidang lingkup Bakesbangpol Prov. Sulteng tahun 2024
5.	Menerapkan Informasi dalam laporan kinerja terkait kualitas pencapaian kinerja atas keberhasilan dan kegagalan agar digunakan untuk mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Rapat evaluasi capaian kinerja tahun 2024
6.	Mendorong agar Evaluasi Kinerja Internal dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya dan pendalaman yang memadai sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	Rapat evaluasi capaian kinerja dan koordinasi antar bidang lingkup Bakesbangpol Prov. Sulteng tahun 2024
7.	Mendorong agar hasil evaluasi kinerja sebagai perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Rapat evaluasi capaian kinerja dan koordinasi antar bidang lingkup Bakesbangpol Prov. Sulteng tahun 2024

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Inikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut, tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama lima tahun adalah:

“Mewujudkan Kondusifitas Daerah melalui Penguatan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (Ipoleksosbud)”.

Adapun sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 :sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
2.	Meningkatnya Penerapan hasil pembinaan, Kebebasan, Kesenjangan dan Kapasitas lembaga Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	76,50	76,80	77,10	77,15	77,20

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026 dengan mengambil target tahun 2024.

2.2 Strategis dan Arah Kebijakan

Dengan memperhatikan lingkungan yang ada, Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai berikut :

1. Memantapkan pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
2. Memantapkan Pelaksanaan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi;
3. Merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya;
5. Peningkatan Kewaspadaan Dini dan penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (Program dan Kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dirumuskan sebagai berikut :

1. Penyusunan Program dan Kebijakan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
2. Koordinasi dan Monev Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
3. Menyusun kebijakan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
4. Melaksanakan Koordinasi Pendidikan Politik, Partai Politik dan Pemilu;
5. Menyusun Kebijakan dan Pemberdayaan Ormas
6. Melaksanakan Monev Pemberdayaan dan Mediasi Sengketa Ormas;
7. Memfasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Kerukunan Umat Beragama
8. Melaksanakan Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya;
9. Optimalisasi dan Penggunaan Media Sosial untuk melakukan

sosialisasi dan meredam konflik di masyarakat;

10. Penguatan Tim Pengawasan OrangAsing dengan Instansi Terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima Tahun mendatang, yaitu dari Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Strategi dan arah Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi TengahTahun 2021-2026

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
- Meningkatnya Penerapan hasil pembinaan, Kebebasan, Kesetaraan dan Kapasitas lembaga Demokrasi	Memantapkan Pelaksanaan Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi	9. Menyusun kebijakan PendidikanPolitik, Etika Budaya Politik dan Pemantauan Situasi Politik diDaerah
		10. Melaksanakan Koordinasi Pendidikan Politik, Partai Politikdan Pemilu

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.a Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait
Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAAN	3.665.727.925,00	4.227.648.825,00	561.920.900,00
	8.01.01.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.665.727.925,00	4.227.648.825,00	561.920.900,00
	8.01.02.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	3.106.372.750,00	2.977.848.250,00	- 128.524.500,00



Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
			5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	20.000.000,00	20.000.000,00	-
			5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	53.193.300,00	53.193.300,00	-
			5.1.02.02.01.0025 Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.591.500,00	1.591.500,00	-
			5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26.916.950,00	26.916.950,00	-
			5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	400.000,00	-	- 400.000,00
			5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	32.400.000,00	56.900.000,00	24.500.000,00
			5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat- Obatan-Obat- Obatan Lainnya	6.800.000,00	4.524.000,00	- 2.276.000,00
			5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	995.988.000,00	926.556.000,00	- 69.432.000,00
			5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka	494.084.000,00	485.679.000,00	- 8.405.000,00
			5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	68.000.000,00	15.600.000,00	- 52.400.000,00
			5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	63.600.000,00	63.600.000,00	-
			5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli	235.000.000,00	235.000.000,00	-
			5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Perta ndingan	69.000.000,00	69.000.000,00	-
			5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias	12.150.000,00	12.150.000,00	-
			5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	181.500.000,00	168.000.000,00	- 13.500.000,00
			5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	26.970.000,00	26.970.000,00	-
			5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	24.000.000,00	20.000.000,00	- 4.000.000,00



Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
			5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	25.200.000,00	25.200.000,00	-
			5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.223.000,00	2.611.500,00	2.611.500,00
			5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	756.946.000,00	756.946.000,00	-
			5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.410.000,00	7.410.000,00	-
			8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	179.040.350,00	620.189.650,00	441.149.300,00
			5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	19.957.550,00	62.496.350,00	42.538.800,00
			5.1.02.02.01.0025 Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	560.450,00	726.450,00	166.000,00
			5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.817.350,00	11.174.350,00	4.357.000,00
			5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	-
			5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.280.000,00	253.352.000,00	217.072.000,00
			5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.000.000,00	31.700.000,00	22.700.000,00
			5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	59.400.000,00	59.400.000,00	-
			5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	24.000.000,00	42.742.500,00	18.742.500,00
			5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.025.000,00	31.825.000,00	22.800.000,00
			5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	-	44.800.000,00	44.800.000,00



Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
			5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	6.300.000,00	6.300.000,00
			5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	2.500.000,00	2.500.000,00
			5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	23.818.000,00	23.818.000,00
			5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	35.355.000,00	35.355.000,00
			8.01.02.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	141.430.900,00	274.962.600,00	133.531.700,00
			5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.596.950,00	66.915.350,00	38.318.400,00
			5.1.02.02.01.0025 Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	318.300,00	318.300,00	-
			5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.765.650,00	4.538.950,00	1.773.300,00
			5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.750.000,00	83.490.000,00	70.740.000,00
			5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.800.000,00	18.400.000,00	5.600.000,00
			5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
			5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67.800.000,00	67.800.000,00	-
			5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11.400.000,00	28.500.000,00	17.100.000,00

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
			8.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	197.278.050,00	313.042.450,00	115.764.400,00
			5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.874.550,00	4.016.950,00	1.142.400,00
			5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	517.500,00	517.500,00	-
			5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	193.886.000,00	308.508.000,00	114.622.000,00
			8.01.02.1.01.0006 Pembentukan Dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara	41.605.875,00	41.605.875,00	-
			5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.689.900,00	13.689.900,00	-
			5.1.02.02.01.0025 Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	242.150,00	242.150,00	-
			5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.313.825,00	1.313.825,00	-
			5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.210.000,00	15.210.000,00	-
			5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.400.000,00	6.400.000,00	-
			5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.750.000,00	4.750.000,00	-



Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
Meningkatnya Penerapan hasil pembinaan, Kebebasan, Kesetaraan dan Kapasitas lembaga Demokrasi	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA PILITIK			63.502.566.450	64.098.036.450	595.470.000,00
		8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik		63.502.566.450	64.098.036.450,00	595.470.000,00
		8.01.03.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		62.448.360.800,00	62.573.395.400,00	125.034.600,00
			5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.850.000,00	1.850.000,00	-
			5.1.02.02.01.0025 Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	366.400,00	366.400,00	-
			5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.880.000,00	11.200.000,00	5.320.000,00
			5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.950.000,00	1.950.000,00	-
			5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	150.430.000,00	150.430.000,00	-
			5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	60.000.000,00	116.000.000,00	56.000.000,00



Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
			5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	60.510.791.200,00	60.510.791.200,00	-
			5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.717.093.200,00	1.780.807.800,00	63.714.600,00
			8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	449.968.550,00	746.342.050,00	296.373.500,00
			5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	126.411.550,00	229.178.050,00	102.766.500,00
			5.1.02.02.01.0025 Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.832.000,00	2.748.000,00	916.000,00
			5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.400.000,00	9.160.000,00	1.760.000,00
			5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	-	-	-
			5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	153.700.000,00	252.150.000,00	98.450.000,00
			5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	68.700.000,00	90.000.000,00	21.300.000,00
			5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	91.925.000,00	11.381.000,00	- 80.544.000,00
			5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	151.725.000,00	151.725.000,00



Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
			8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	235.562.700,00	235.562.700,00	-
			5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	57.193.500,00	57.193.500,00	-
			5.1.02.02.01.0025 Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.099.200,00	1.099.200,00	-
			5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.440.000,00	4.440.000,00	-
			5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.250.000,00	16.250.000,00	-
			5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.900.000,00	12.900.000,00	-
			5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.500.000,00	7.500.000,00	-
			5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	112.430.000,00	112.430.000,00	-
			5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	23.750.000,00	23.750.000,00	-
			8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	368.674.400,00	542.736.300,00	174.061.900,00
			5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.271.400,00	8.420.300,00	4.148.900,00



Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
			5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.680.000,00	3.680.000,00	-
			5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	360.723.000,00	530.636.000,00	169.913.000,00
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			30.906.847.327,00	41.153.800.138,00	10.246.952.811,00
		8.01.04.1.01 Penyusunan Bahan Perumusan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas , Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Dan Ormas Asing Daerah		30.906.847.327,00	41.153.800.138,00	10.246.952.811,00
		8.01.04.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah		30.490.898.877,00	40.204.733.788,00	9.713.834.911,00
			5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.299.666.877,00	1.697.791.788,00	398.124.911,00
			5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	28.641.232.000,00	30.591.232.000,00	1.950.000.000,00
			5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	550.000.000,00	5.645.710.000,00	5.095.710.000,00
			5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	2.270.000.000,00	2.270.000.000,00
		8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah		164.878.450,00	607.100.350,00	442.221.900,00
			5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan- Bahan Lainnya	-	82.400.000,00	82.400.000,00



Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
			5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	28.801.250,00	119.603.550,00	90.802.300,00
			5.1.02.02.01.0025 Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	332.000,00	498.000,00	166.000,00
			5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.015.200,00	8.022.800,00	5.007.600,00
			5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	-	14.010.000,00	14.010.000,00
			5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.382.000,00	181.982.000,00	129.600.000,00
			5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.800.000,00	29.400.000,00	16.600.000,00
			5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23.950.000,00	23.950.000,00	-
			5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	-	36.000.000,00	36.000.000,00
			5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
			5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.598.000,00	30.234.000,00	15.636.000,00
			5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.500.000,00	9.500.000,00	-
			5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.500.000,00	52.000.000,00	42.500.000,00
			5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	9.500.000,00	9.500.000,00
			8.01.04.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	79.300.950,00	79.300.950,00	-
			5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.757.350,00	5.757.350,00	-

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
			5.1.02.02.01.0025 Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	166.000,00	166.000,00	-
			5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.507.600,00	1.507.600,00	-
			5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.020.000,00	7.020.000,00	-
			5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.700.000,00	6.700.000,00	-
			5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	-
			5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.150.000,00	46.150.000,00	-
			5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.500.000,00	9.500.000,00	-
			8.01.04.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	171.769.050,00	262.665.050,00	90.896.000,00
			5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.083.550,00	2.083.550,00	-
			5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	517.500,00	517.500,00	-
			5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	169.168.000,00	260.064.000,00	90.896.000,00
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL, BUDAYA			435.083.625,00	603.709.475,00	168.625.850,00
			8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	435.083.625,00	603.709.475,00	168.625.850,00



Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
			8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	56.710.200,00	115.960.200,00	59.250.000,00
			5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.686.000,00	6.686.000,00	-
			5.1.02.02.01.0025 Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	166.000,00	166.000,00	-
			5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.788.200,00	7.038.200,00	5.250.000,00
			5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.615.000,00	19.615.000,00	-
			5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.400.000,00	6.400.000,00	-
			5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.930.000,00	9.930.000,00	-
			5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	-	54.000.000,00	54.000.000,00
			5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
			5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.125.000,00	7.125.000,00	-
			8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	132.957.300,00	132.957.300,00	-
			5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.897.000,00	29.897.000,00	-



Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
			5.1.02.02.01.0025 Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	332.000,00	332.000,00	-
			5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.928.300,00	3.928.300,00	-
			5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.300.000,00	14.300.000,00	-
			5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.100.000,00	13.100.000,00	-
			5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
			5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	56.900.000,00	56.900.000,00	-
			5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.500.000,00	9.500.000,00	-
			8.01.05.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	245.416.125,00	354.791.975,00	109.375.850,00
			5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.470.000,00	4.889.850,00	3.419.850,00
			5.1.02.02.01.0025 Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	388.125,00	388.125,00	-
			5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	243.558.000,00	349.514.000,00	105.956.000,00
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			1.621.968.000,00	1.912.296.250,00	290.328.250,00
			8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	1.621.968.000,00	1.912.296.250,00	290.328.250,00



Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
			8.01.06.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	236.948.300,00	331.431.650,00	94.483.350,00
			5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.532.500,00	56.088.400,00	24.555.900,00
			5.1.02.02.01.0025 Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.909.800,00	2.387.250,00	477.450,00
			5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.440.000,00	5.740.000,00	1.300.000,00
			5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	-	2.400.000,00	2.400.000,00
			5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.050.000,00	59.250.000,00	35.200.000,00
			5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	72.000.000,00	10.400.000,00	- 61.600.000,00
			5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	44.700.000,00	44.700.000,00
			5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
			5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80.916.000,00	118.866.000,00	37.950.000,00
			5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17.100.000,00	26.600.000,00	9.500.000,00



Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
			8.01.06.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	133.038.750,00	133.038.750,00	-
			5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.306.150,00	23.306.150,00	-
			5.1.02.02.01.0025 Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	636.600,00	636.600,00	-
			5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.480.000,00	1.480.000,00	-
			5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.600.000,00	24.600.000,00	-
			5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.400.000,00	13.400.000,00	-
			5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.500.000,00	30.500.000,00	-
			5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.616.000,00	29.616.000,00	-
			5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.500.000,00	9.500.000,00	-
			8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	142.529.750,00	290.868.650,00	148.338.900,00
			5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.164.850,00	57.812.850,00	26.648.000,00
			5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	4.400.000,00	4.400.000,00



Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
			5.1.02.02.01.0025 Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	954.900,00	1.909.800,00	954.900,00
			5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.480.000,00	3.660.000,00	2.180.000,00
			5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	-	4.800.000,00	4.800.000,00
			5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.700.000,00	42.060.000,00	30.360.000,00
			5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.200.000,00	22.900.000,00	7.700.000,00
			5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00
			5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.780.000,00	126.476.000,00	63.696.000,00
			5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.250.000,00	23.750.000,00	9.500.000,00
			8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	193.959.700,00	303.265.700,00	109.306.000,00
			5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8.873.900,00	8.873.900,00	-
			5.1.02.02.01.0025 Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.909.800,00	1.909.800,00	-
			5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.760.000,00	2.760.000,00	-
			5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	3.250.000,00	3.250.000,00

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
			5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	180.416.000,00	282.072.000,00	101.656.000,00
			8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	915.491.500,00	853.691.500,00	- 61.800.000,00
			5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	164.391.900,00	154.391.900,00	- 10.000.000,00
			5.1.02.02.01.0025 Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.819.600,00	3.819.600,00	-
			5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9.200.000,00	9.200.000,00	-
			5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	24.750.000,00	24.750.000,00	-
			5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	12.000.000,00	6.000.000,00	- 6.000.000,00
			5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	214.000.000,00	214.000.000,00	-
			5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	33.400.000,00	21.600.000,00	- 11.800.000,00
			5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	293.400.000,00	259.400.000,00	- 34.000.000,00
			5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	24.000.000,00	24.000.000,00	-
			5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	136.530.000,00	136.530.000,00	-

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpol Prov. Sulteng Tahun 2024

Tabel 2.3.b Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	BAKESBANGPOL PROVINSI SULAWESI TENGAH	111.790.539.544,00	124.013.959.017,86	12.223.419.473,86
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.658.346.217,00	12.018.467.879,86	360.121.662,86



Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		382.623.200,00	472.898.200,00	90.275.000,00
		8.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		18.773.300,00	18.922.400,00	149.100,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		2.718.550,00	2.867.650,00	149.100,00
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		2.704.750,00	2.704.750,00	-
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1.500.000,00	1.500.000,00	-
		5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		2.750.000,00	2.750.000,00	-
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat		9.100.000,00	9.100.000,00	-
		8.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		71.082.800,00	75.352.800,00	4.270.000,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1.104.900,00	1.104.900,00	-
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		760.400,00	760.400,00	-
		5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1.787.500,00	1.787.500,00	-
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat		59.400.000,00	63.450.000,00	4.050.000,00
		5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		8.030.000,00	8.250.000,00	220.000,00
		8.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		292.767.100,00	378.623.000,00	85.855.900,00
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		23.380.600,00	23.224.500,00	156.100,00
		5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		864.400,00	864.400,00	-
		5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		900.000,00	900.000,00	-

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
			5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	962.500,00	962.500,00	-
			5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	6.873.600,00	6.873.600,00	-
			5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.200.000,00	1.200.000,00	-
			5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.100.000,00	37.100.000,00	-
			5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.000.000,00	18.000.000,00	-
			5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	7.450.000,00	-
			5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.500.000,00	7.500.000,00	-
			5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	188.536.000,00	274.548.000,00	86.012.000,00
			8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.837.167.603,00	8.264.194.785,86	- 572.972.817,14
			8.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.301.255.953,00	6.684.663.135,86	- 616.592.817,14
			5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS	3.721.961.935,00	3.471.578.723,64	- 250.383.211,36
			5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS	346.158.900,00	346.158.900,00	-
			5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS	229.988.900,00	229.988.900,00	-
			5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	105.955.613,00	105.955.613,00	-
			5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS	180.096.357,00	180.096.357,00	-
			5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.854.818,00	10.915.034,38	2.060.216,38
			5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS	400.541.898,00	549.607,84	- 399.992.290,16
			5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.307.697.532,00	2.339.420.000,00	31.722.468,00

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
			8.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.447.535.000,00	1.491.155.000,00	43.620.000,00
				252.360.000,00	271.680.000,00	19.320.000,00
			5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawab an Pengelola Keuangan	232.200.000,00	251.520.000,00	19.320.000,00
			5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	-
			5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12.000.000,00	12.000.000,00	-
				1.195.175.000,00	1.219.475.000,00	24.300.000,00
			5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.185.150.000,00	1.209.450.000,00	24.300.000,00
			5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.025.000,00	10.025.000,00	-
			8.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	88.376.650,00	88.376.650,00	-
			5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.470.650,00	2.470.650,00	-
			5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	996.000,00	996.000,00	-
			5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-
			5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.650.000,00	1.650.000,00	-
			5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.150.000,00	7.150.000,00	-
			5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli	25.000.000,00	25.000.000,00	-
			5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.810.000,00	50.810.000,00	-
			8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	105.490.750,00	129.962.800,00	24.472.050,00
			8.01.01.1.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.436.150,00	1.436.150,00	-

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
			5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	481.650,00	481.650,00	-
			5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	332.000,00	332.000,00	-
			5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	72.500,00	72.500,00	-
			5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	550.000,00	550.000,00	-
			8.01.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	93.700.350,00	93.172.400,00	527.950,00
			5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.014.850,00	1.239.900,00	225.050,00
			5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	332.000,00	332.000,00	-
			5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	72.500,00	72.500,00	-
			5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	550.000,00	550.000,00	-
			5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli,Saksi Ahli, dan Beracara	19.800.000,00	-	19.800.000,00
			8.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.008.200,00	70.008.200,00	-
			5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	71.931.000,00	90.978.000,00	19.047.000,00
			8.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.354.250,00	35.354.250,00	25.000.000,00
			5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	949.750,00	949.750,00	-
			5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	332.000,00	332.000,00	-
			5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	72.500,00	72.500,00	-



Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
			5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	550.000,00	550.000,00	-
			5.1.02.02.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.450.000,00	8.450.000,00	-
			5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	25.000.000,00	25.000.000,00
			8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	107.470.275,00	52.254.600,00	- 55.215.675,00
			8.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	52.254.600,00	52.254.600,00	-
			5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	52.254.600,00	52.254.600,00	-
			8.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.215.675,00	-	- 55.215.675,00
			5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	55.215.675,00	-	- 55.215.675,00
			8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	552.604.856,00	789.189.461,00	236.584.605,00
			8.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.490.271,00	22.490.271,00	-
			5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	7.492.321,00	7.492.321,00	-
			5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.997.950,00	14.997.950,00	-
			5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	28.046.200,00	28.046.200,00	-
			5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	41.962.000,00	41.962.000,00	-
			8.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	45.400.000,00	45.400.000,00	-
			5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	16.000.000,00	16.000.000,00	-



Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
			5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	29.400.000,00	29.400.000,00	-
			8.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.000.000,00	59.000.000,00	-
			5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	59.000.000,00	59.000.000,00	-
			8.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355.706.385,00	592.290.990,00	236.584.605,00
			5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.657.500,00	3.230.000,00	1.572.500,00
			5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	45.500.600,00	92.073.650,00	46.573.050,00
			5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.273.200,00	3.183.000,00	1.909.800,00
			5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.477.085,00	7.508.340,00	5.031.255,00
			5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	250.000,00	250.000,00	-
			5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	550.000,00	1.100.000,00	550.000,00
			5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/cendera mata	16.800.000,00	19.200.000,00	2.400.000,00
			5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	62.400.000,00	184.850.000,00	122.450.000,00
			5.1.02.01.01.0003 Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.150.000,00	10.750.000,00	1.400.000,00
			5.1.02.02.01.0003 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	10.450.000,00	12.950.000,00	2.500.000,00
			5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	202.198.000,00	240.446.000,00	38.248.000,00
			5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang		5.000.000,00	5.000.000,00



Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
			5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		3.250.000,00	3.250.000,00
			5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		8.500.000,00	8.500.000,00
			8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	690.353.600,00	1.078.062.100,00	387.708.500,00
			8.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	440.192.000,00	542.313.200,00	102.121.200,00
			5.2.02.05.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	400.000.000,00	502.121.200,00	102.121.200,00
			5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.192.000,00	40.192.000,00	-
			8.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	73.200.000,00	127.662.000,00	54.462.000,00
			5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel	73.200.000,00	127.662.000,00	54.462.000,00
			8.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	176.961.600,00	408.086.900,00	231.125.300,00
			5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin	21.000.000,00	27.519.300,00	6.519.300,00
			5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer	95.609.600,00	261.599.600,00	165.990.000,00
			5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	7.532.000,00	15.064.000,00	7.532.000,00
			5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	52.820.000,00	69.110.000,00	16.290.000,00
			5.2.02.10.01.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	9.820.000,00	9.820.000,00
			5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio dan Film	-	6.226.000,00	6.226.000,00
			5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Alat komunikasi Telephone	-	5.748.000,00	5.748.000,00
			5.2.02.10.01.0005 Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	-	13.000.000,00	13.000.000,00
			8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.825.933,00	305.825.933,00	20.000.000,00



Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
			8.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.752.000,00	132.752.000,00	20.000.000,00
			5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon	2.820.000,00	2.820.000,00	-
			5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik	65.052.000,00	65.052.000,00	-
			5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	44.880.000,00	49.880.000,00	5.000.000,00
			5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	15.000.000,00	15.000.000,00
			8.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	141.653.933,00	141.653.933,00	-
			5.1.02.02.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	36.836.000,00	36.836.000,00	-
			5.1.02.02.01.0025 Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	43.617.933,00	43.617.933,00	-
			5.1.02.02.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000,00	5.000.000,00	-
			5.1.02.02.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Bahan Komputer	44.000.000,00	44.000.000,00	-
			5.1.02.02.04.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	-
			5.1.02.02.04.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	7.000.000,00	7.000.000,00	-
			8.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.420.000,00	31.420.000,00	-
			5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.420.000,00	3.420.000,00	-
			5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	28.000.000,00	28.000.000,00	-
			8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	696.810.000,00	926.080.000,00	229.270.000,00



Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
			8.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	657.550.000,00	876.820.000,00	219.270.000,00
			5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	359.900.000,00	528.600.000,00	168.700.000,00
			5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	18.100.000,00	18.100.000,00	-
			5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	241.150.000,00	280.200.000,00	39.050.000,00
			5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	38.400.000,00	49.920.000,00	11.520.000,00
			8.01.01.1.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.260.000,00	49.260.000,00	10.000.000,00
			5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	14.640.000,00	14.640.000,00	-
			5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.500.000,00	7.500.000,00	-
			5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.220.000,00	10.220.000,00	-
			5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.900.000,00	6.900.000,00	-

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
			5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-	10.000.000,00	10.000.000,00

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan /Formulasi perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Jumlah Aspek dibagi Jumlah Total Aspek x 100%	BPS Sulteng	1. Bidang Politik 2. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 3. Bidang Kewaspadaan 4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan 5. Sekretariat

Sumber : IKU Badan Kesbangpol Tahun 2024

2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2024 adalah Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024. Berikut Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2024 dengan sasaran:

1. Meningkatnya Penerapan hasil pembinaan, Kebebasan, Kesetaraan dan Kapasitas lembaga Demokrasi.

Tabel 2.5.a
Matriks Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penerapan hasil pembinaan, Kebebasan, Kesenjangan dan Kapasitas lembaga Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	77,10 (Indeks)

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2024

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 124.013.959.018,- yang selengkapny sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2024 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target kinerja yang diperjanjikan tahun 2024. Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2024.

3.1 Capaian Kinerja

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing masing indikator kinerja sehingga dapat ditindak lanjuti dalam perencanaan kegiatan dimasa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2024 akan diuraikan menurut Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 3.1.a Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
	Mewujudkan Kondusifitas Daerah melalui Penguatan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (Ipoleksosbud) - Meningkatnya Penerapan hasil pembinaan, Kebebasan, Kesetaraan dan Kapasitas lembaga Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	77,10	79,35 (Rilis tahun 2025 oleh BPS)	102	(Sangat Tinggi)

Penurunan target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2024 sebesar 77,10, yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang mencapai 79,35, bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Namun, untuk mengetahui alasan pasti, kita perlu melihat beberapa aspek yang memengaruhi pengukuran IDI. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab penurunan tersebut:

Perubahan dalam indikator pengukuran: IDI mengukur tiga dimensi utama: kebebasan sipil, hak-hak politik, dan partisipasi politik. Jika ada perubahan dalam indikator atau metode pengukuran di tahun 2024, seperti penurunan dalam kebebasan sipil atau hak-hak politik, hal ini dapat menyebabkan penurunan skor keseluruhan.

Tantangan dalam kebebasan sipil: Salah satu dimensi yang mempengaruhi IDI adalah kebebasan sipil. Jika ada peningkatan pembatasan terhadap kebebasan berbicara, berkumpul, atau media yang lebih terbatas pada tahun 2024, hal ini bisa menurunkan skor IDI. Misalnya, kebijakan yang membatasi kebebasan pers atau tindakan terhadap aktivis atau kelompok yang kritis terhadap pemerintah dapat memengaruhi skor ini.

Kondisi politik dan kebebasan berekspresi: Di tahun-tahun menjelang 2024, mungkin ada pergeseran dalam politik Indonesia yang berdampak pada kebebasan berekspresi dan hak politik warga negara. Jika ada penurunan dalam kebebasan politik, seperti adanya tekanan terhadap oposisi atau meningkatnya ketegangan politik, ini dapat menyebabkan penurunan skor IDI.

Partisipasi politik: Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting dalam IDI. Jika ada penurunan dalam partisipasi pemilih atau penurunan minat masyarakat terhadap pemilu atau proses politik lainnya, ini dapat menurunkan skor IDI. Misalnya, tingkat partisipasi dalam pemilu atau demonstrasi yang lebih rendah dapat berkontribusi pada penurunan ini.

Pengaruh perubahan kebijakan atau regulasi: Terkadang, perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah yang baru dapat mempengaruhi kualitas demokrasi, baik itu dalam hal hak-hak politik, kebebasan sipil, atau proses pemilu. Misalnya, perubahan aturan pemilu atau kebijakan yang

membatasi ruang demokrasi bisa mengurangi skor IDI.

Faktor eksternal atau global: Kondisi internasional atau global juga bisa memengaruhi demokrasi di Indonesia. Misalnya, jika ada tekanan internasional atau perubahan dalam hubungan luar negeri yang memengaruhi kebebasan berpendapat dan hak politik, ini bisa berdampak pada IDI.

Penurunan tersebut harus dianalisis lebih mendalam dengan melihat laporan resmi atau penjelasan dari lembaga yang mengukur IDI untuk mengetahui faktor spesifik yang memengaruhi perubahan tersebut.

b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir

Bedasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah realisasi capaiannya dikategorikan sangat baik karena realisasinya melampaui target yang telah ditetapkan dalam RKPD .

Tabel 3.1.b Perbandingan capaian kinerja beberapa tahun

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Targ et	Realis asi	% Capai an	Targ et	Real isasi	% Capai an	Targ et	Realis asi	% Capai an
	Mewujudkan Kondusifitas Daerah melalui Penguatan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (Ipoleksosbud) - Meningkatkan Penerapan hasil pembinaan, Kebebasan, Kesenjangan dan Kapasitas lembaga Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	76,5	80,92	105	76,8	79,13	103	77,10	79,35 (Rilis tahun 2025 oleh BPS)	102

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator yang mengukur tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia berdasarkan aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.

Di Provinsi Sulawesi Tengah, capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menunjukkan fluktuasi dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, nilai IDI tercatat sebesar **79,13**, yang termasuk dalam **kategori baik** pada skala pengukuran IDI. Pada tahun 2024, nilai tersebut meningkat menjadi **79,35**. Meskipun masih berada dalam kategori yang sama, peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam beberapa aspek demokrasi di daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing masing indikator kinerja sehingga dapat ditindak lanjuti dalam perencanaan kegiatan dimasa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2024 akan diuraikan menurut Sasaran Strategis sebagai berikut :

Tabel 3.1.c Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Di Renstra

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Mewujudkan Kondusifitas Daerah melalui Penguatan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (Ipoleksosbud)				
	- Meningkatnya Penerapan hasil pembinaan, Kebebasan, Kesetaraan dan Kapasitas lembaga Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	79,35 (Rilis tahun 2025 oleh BPS))	80,38	98,4

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami perkembangan yang signifikan, dengan tingkat kemajuan mencapai 98,4%. Capaian ini mencerminkan adanya peningkatan dalam berbagai aspek demokrasi, termasuk kebebasan sipil, hak-hak politik, serta peran lembaga demokrasi dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah terus berupaya memperkuat fondasi demokrasi dengan memperluas ruang partisipasi masyarakat, memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, serta menjaga kebebasan berekspresi dan pers. Selain itu, peran aktif organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta media dalam mengawal kebijakan publik turut berkontribusi terhadap perbaikan skor IDI.

Namun, meskipun mengalami kemajuan, tantangan dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat lembaga demokrasi, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih menjadi agenda penting untuk memastikan tren positif ini dapat terus berlanjut.

Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan Sulawesi Tengah dapat semakin memperkuat posisinya sebagai daerah dengan tingkat demokrasi yang berkualitas dan berkelanjutan.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Penerapan hasil pembinaan, Kebebasan, Kesetaraan dan Kapasitas lembaga Demokrasi mempunyai indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan target 77,10 pada tahun 2024 dan capaian realisasi (akan dikeluarkan BPS) dengan formulasi perhitungan Jumlah Aspek dibagi Jumlah Total Aspek capaian kinerja dari indikator kinerja (dikeluarkan BPS).

Perbandingan realisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Realisasi Kinerja Level Nasional dalam Hal ini dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri adalah membandingkan capaian realisasi IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan IKU Ditjen Polpum yang juga menetapkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan target tahun 2024 adalah 77,10%. Sedangkan target IKU Direktorat

Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tahun 2024 adalah 78,66%. Sedangkan Capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 adalah sebesar 79,35%, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Nilai tersebut diperoleh melalui formulasi perhitungan jumlah aspek dibagi dengan total aspek capaian kinerja dari indikator kinerja. jika dibandingkan, capaian target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 melampaui target nasional. Hal ini disebabkan oleh peningkatan signifikan pada aspek dan indikator pembentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Tengah, serta kemampuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengoordinasikan dan mengomunikasikan berbagai hal yang berpengaruh terhadap nilai IDI di daerah tersebut.

Perbandingan realisasi Standar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun ini dengan Standar Nasional tampak sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.d .1 Tabel Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	6	6=4/5*100
	Mewujudkan Kondusifitas Daerah melalui Penguatan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (Ipoleksosbud) - Meningkatnya Penerapan hasil pembinaan, Kebebasan, Kesenjangan dan Kapasitas lembaga Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	79,35 (Rilis tahun 2025 oleh BPS)	78,66	99,06

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Hasil analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 pada pelaksanaan rencana strategis mencakup sasaran strategis dari penilaian berdasarkan pengukuran capaian kinerja yang diterapkan dari indikator sasaran terdapat keberhasilan yang memuaskan sehingga dapat disimpulkan bahwa Program/Kegiatan yang ada dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah pada tahun 2024.

Beberapa Kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Kesbangpol untuk mendukung sasaran “***Meningkatnya Penerapan hasil pembinaan, Kebebasan, Kesetaraan dan Kapasitas lembaga Demokrasi*** “ tersebut adalah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator penting dalam menilai perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. IDI mengukur tiga aspek utama demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Data IDI digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan dalam upaya memperkuat demokrasi di tingkat daerah dan nasional.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berperan aktif dalam mensosialisasikan IDI guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya demokrasi yang berkualitas. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai IDI serta membangun komitmen bersama dalam menjaga stabilitas politik dan demokrasi di daerah. Adapun tujuan dilaksanakannya sosialisasi IDI yaitu:

- 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan mengenai konsep IDI dan urgensinya.
- 2) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas dan perkembangan demokrasi
- 3) Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam peningkatan nilai IDI di Provinsi Sulawesi Tengah
- 4) Meningkatkan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam membangun demokrasi yang lebih baik

Badan Kesatuan bangsa provinsi Sulawesi tengah memiliki target IDI sebesar 77.10. Dalam upaya mencapai nilai IDI tersebut dengan mengikutsertakan beberapa lapisan masyarakat yaitu pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi sipil, mahasiswa dan pemuda sebagai generasi penerus. Adapun metode yang digunakan dalam mensosialisasikan Indeks demokrasi indonesi dengan sangat variatif yaitu melalui seminar,dan diskusi, workshop dan pelatihan, publikasi sosial media serta penyebaran bahan sosialisasi.

Berikut adalah beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Kesatuan bangsa provinsi Sulawesi tengah pada tahun 2024 yaitu :

- 1) Pendidikan politik bagi pemilih perempuan dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024 di kabupaten banggai, tujuan

kegiatan ini meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam menyukseskan pilkada 2024. Kegiatan ini melibatkan perwakilan perempuan dari majelis taklim, Organisasi Gereja, Organisasi Perempuan Hindu, Perempuan dari partai politik, perempuan komunitas UMKM, dan Perempuan unsur pemilih pemula.

- 2) Kegiatan Pendidikan Politik bagi pemilih perempuan menyukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024
- 3) Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia kegiatan ini merupakan salah satu implementasi dari kegiatan pendidikan politik masyarakat. Tujuan kegiatan ini bertujuan menyampaikan hasil perhitungan indeks demokrasi Indonesia pada provinsi Sulawesi tengah Tahun 2023 berdasarkan aspek dan indikator serta saran dan masukan yang berkaitan dengan pelaksanaan Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2024, kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi sipil, mahasiswa dan pemuda sebagai generasi penerus
- 4) Sosialisasi Pemantapan etika dan budaya politik provinsi Sulawesi tengah di Kabupaten Buol tahun 2024 yang merupakan implementasi program pendidikan politik masyarakat pada Badan Kesatuan bangsa provinsi Sulawesi tengah, kegiatan ini bermaksud menumbuhkan kesadaran berdemokrasi berdasarkan etika dan budaya politik adapun tujuan kegiatan ini meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai etika dan budaya politik dalam rangka menciptakan nilai – nilai politik santun menjeang pilkada serentak tahun 2024, peserta pada kegiatan ini mencakup Organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, masyarakat umum, dan staff Badan Kesatuan bangsa dan Politikn Kabupaten Buol
- 5) Sosialisasi Peraturan perundang-undangan Bidang Politik Provinsi Sulawesi Tengah , kegiatan ini bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan agar meningkatkan pemahaman pengetahuan serta menumbuhkembangkan kesadaran berdemokrasi dimasyarakat menjelang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024, kegiatan ini di hadiri oleh pengurus partai politik, tokoh masyarakat, ormas, serta staff Badan Kesatuan bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berharap agar nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terus

meningkat melalui langkah-langkah strategis dengan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam proses demokrasi, termasuk dalam pemilu dan musyawarah publik, memberikan pelatihan kepada aparat pemerintahan, tokoh masyarakat, dan organisasi sipil dalam memahami dan menerapkan prinsip demokrasi, Menggandeng perguruan tinggi serta media untuk melakukan kajian dan publikasi yang mendorong kesadaran demokrasi, Mengembangkan platform digital untuk edukasi dan pelaporan transparansi guna meningkatkan pengawasan publik terhadap proses demokrasi, dan Melakukan pengukuran dan evaluasi rutin guna menilai efektivitas program peningkatan IDI serta merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran

Badan kesatuan bangsa dan politik daerah provinsi Sulawesi tengah berharap dengan dilaksanakan beberapa kegiatan tersebut dapat menaikkan nilai IDI Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 serta mencapai target pada tahun 2024 dengan nilai 77,10 atau bahkan diatas target tersebut, serta dapat dijadikan bahan evaluasi dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Hasil analisis dalam penggunaan sumber daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 pada pelaksanaan rencana strategis mencakup 1 (Satu) sasaran strategis dari penilaian berdasarkan pengukuran capaian kinerja yang diterapkan dari beberapa indikator sasaran terdapat keberhasilan yang memuaskan dari semua indikator yang ada, walaupun sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana kantor yang belum memadai, namun demikian dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga pelaksanaan rencana strategik mencakup 1 (Satu) sasaran strategik dapat dilaksanakan. Pada tahun 2024, total anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp124.013.959.017. Dari jumlah tersebut, telah terealisasi sebesar Rp121.563.364.199, atau sekitar 98,02% dari total anggaran yang tersedia.

Realisasi anggaran ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan. Sebagian besar anggaran digunakan untuk

pembiayaan operasional, program strategis, serta kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas layanan dan pembangunan daerah.

Sisa anggaran sebesar Rp 2.450.594.818 (sekitar 1,98%) disebabkan oleh beberapa faktor, seperti efisiensi belanja, perubahan kebutuhan di lapangan, serta adanya penghematan dari beberapa pos anggaran

Tabel 3.1.f. Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (5 - 8)
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mewujudkan Kondusifitas Daerah melalui Penguatan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (Ipoleksosbud)							
	- Meningkatkan Penerapan hasil pembinaan, Kebebasan, Kesetaraan dan Kapasitas lembaga Demokrasi	77,10	79,35 (Rilis tahun 2025 oleh BPS)	102	124.013.959.017	121.579.323.000 (Realisasi anggaran ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program /kegiatan yang telah ditetapkan)	98,03	4%

g. Analisis Program/kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja

Hasil analisis Program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 pada pelaksanaan rencana strategik mencakup sasaran strategik dari penilaian berdasarkan pengukuran capaian kinerja yang diterapkan dari beberapa indikator sasaran terdapat keberhasilan yang memuaskan sehingga dapat disimpulkan bahwa Program/Kegiatan yang ada dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024.

Tabel 3.1.g Analisis Program_Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH					124.013.959.017		121.579.323.000	-	102,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	100,00	12.041.467.879		10.479.105.628		114,90
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,00	472.898.200	60	389.145.210	-	121,52
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	18.922.400,00	4	14.872.250	150	127,2329



No	Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	75.352.800,00	1	66.041.900	100	114,0985
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	378.623.000,00	1	308.231.060	100	122,8374
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran	Persentase	97,50	7.834.924.785	17,28	6.399.735.720	564,236111	122,43
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	6.255.393.135,00	8	4.832.843.455	150	129,4350457
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1.491.155.000,00	2	1.480.840.000	50	100,6965641
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	88.376.650,00	1	86.052.265	100	102,7011317
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	3	129.962.800	0,00	120.922.911	-	107,4757454



No	Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	93.172.400,00	0,00	90.505.661	- !	102,9465
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	35.354.250,00	0,00	30.417.250	-	116,2309216
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89	52.254.600	82	52.224.000	108,5889571	100,0585938	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	52.254.600	1	52.224.000	100	100,0585938
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	6	789.189.461	3	780.092.515	200	101,1661368
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	22.490.271,00	0,00	22.490.271	-	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	70.008.200,00	1	69.945.820	100	100,0891833



No	Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	45.400.000,00	1	39.770.000	100	114,1563993
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	59.000.000,00	1	58.900.000	100	100,1697793
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	592.290.990,00	0	588.986.424	0	100,5610598
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan	6	1.530.332.100	0	.513.240.000	-	101,1295036
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	994.583.200	0	982.190.000	-	101,2617925
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	127.662.000	1	125.700.000	100	101,5608592
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	408.086.900	9	405.350.000	222,	100,6751943
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	305.825.933	6	299.522.945	50	102,1043423



No	Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	132.752.000	6	127.587.262	16,66666667	104,0480044
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	141.653.933	0	140.515.683	-!	100,8100519
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	31.420.000	1	31.420.000	100	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	926.080.000	32	924.222.327	9,375	100,2009985	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan		Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	32	876.820.000,00	24	876.022.327	133,3333333	100,0910562
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	49.260.000,00	8	48.200.000	750	102,1991701



No	Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Generasi Muda yang diberikan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	60	4.227.648.825	1,39	4.143.529.212	4329,004329	102,0301441
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Dokumen Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen	5	4.227.648.825	4	4.143.529.212	125	102,0301441
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	1	2.977.848.250,00	1	2.911.467.017	100	102,2799926
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	100	620.189.650,00	125	607.622.642	80	102,0682258



No	Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	150	274.962.600,00	0,00	270.953.450	-!	101,4796453
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	4	313.042.450,00	2	312.380.228	200	100,2119923
	Pembentukan dan Penguatan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penguatan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	50	41.605.875,00	50	41.105.875	100	101,2163711



No	Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya Penerapan hasil pembinaan, Kebebasan, Kestaraan dan Kapasitas lembaga Demokrasi	Persentase Masyarakat yang memahami i aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Persentase	77,10	64.098.036.450	79,35	61.321.500.556	102	95,66
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	Dokumen	4	64.098.036.450	4	64.059.202.923	100	100,0606213
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	Dokumen	4	64.098.036.450	4	64.059.202.923	100	



No	Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Disusun	Dokumen	1	62.573.395.400	2	62.555.349.400	50	100,0288481
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	40	746.342.050,00	290	727.283.640	13,79310345	102,6204921



No	Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	150	235.562.700,00	150	234.064.900	100	100,639908
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	40	746.342.050,00	290	727.283.640	40	746.342.050,00



No	Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas yang terdaftar pada Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase	100	41.130.800.138	0	40.413.150.390	33333,33333	101,7757827
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen	4	41.130.800.138	66	40.413.150.390	6,060606061	101,7757827
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	40.181.733.788	0	39.496.192.000	-!	101,7357162
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	60	607.100.350,00	160	595.144.639	37,5	102,0088749



No	Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	60	79.300.950,00	0	75.386.189	-!	105,1929419
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	4	262.665.050,00	2	246.427.562	200	106,5891526
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase	60	603.709.475	0,45	576.673.708	13333,33333	104,688226
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen	3	603.709.475	5	576.673.708	60	104,688226



No	Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	60	115.960.200,00	75	108.642.700	80	106,7353812
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	60	132.957.300,00	0	131.743.900	-!	100,9210294



No	Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	4	354.791.975,00	1	336.287.108	400	105,5026989
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Kewaspadaan Dini di Daerah	Persentase	60	1.912.296.250	1,53	1.907.661.139	3921,568627	100,2429735
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Dokumen Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah	Dokumen		5	1.912.296.250	6	1.907.661.139	83,3333333



No	Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Disusun	Dokumen	1	331.431.650,00	1	346.418.511	100	95,67377016
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	130	133.038.750,00	0	125.400.841	-!	106,0907957



No	Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	331.431.650,00	1	346.418.511	100	95,67377016
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	130	133.038.750,00	0	125.400.841	-!	106,0907957



No	Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	150	290.868.650,00	75	286.564.454	200	101,5019993
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	4	303.265.700,00	4	302.984.620	100	100,0927704

No	Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	4	853.691.500,00	1	846.292.713	400	100,8742586
						124.013.959,017		121.579.323.000	-!	102,0025083

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menjalankan sejumlah program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai pernyataan kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian pernyataan kinerja tersebut dapat dianalisis melalui pelaksanaan berbagai program/kegiatan yang telah direncanakan.

1. Keberhasilan Program dan Kegiatan

Beberapa program yang berhasil dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, antara lain adalah:

- 1) Penguatan Kebhinnekaan dan Toleransi Sosial: Program ini berhasil mempererat hubungan antar kelompok masyarakat dengan menggelar berbagai forum-dialog lintas agama dan budaya. Selain itu, program pelatihan dan penyuluhan tentang pentingnya keberagaman juga mendapatkan sambutan positif dari masyarakat, yang turut berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih harmonis.
- 2) Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat: Program ini fokus pada peningkatan partisipasi warga dalam kegiatan politik, terutama menjelang Pemilu 2024. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang diselenggarakan di berbagai daerah menunjukkan hasil yang positif, dengan meningkatnya jumlah pemilih muda yang aktif menggunakan hak pilihnya.
- 3) Penguatan Lembaga Kemasyarakatan: Program yang bertujuan

untuk memperkuat kapasitas lembaga kemasyarakatan di tingkat desa dan kelurahan juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Melalui pelatihan dan pemberian bantuan dana untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, lembaga-lembaga ini berhasil menjadi lebih aktif dalam menjalankan fungsi-fungsinya, terutama dalam membangun partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

2. Kendala dan Tantangan yang Dihadapi

Meskipun ada berbagai keberhasilan, beberapa tantangan juga muncul yang berdampak pada keterlambatan atau kegagalan pencapaian target kinerja. Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Beberapa kegiatan terhambat karena kurangnya tenaga ahli atau fasilitator yang berkompeten dalam pelaksanaan program. Hal ini berdampak pada kualitas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan harapan.
- 2) Tantangan Geografis dan Infrastruktur: Kondisi geografis yang sulit dijangkau dan terbatasnya infrastruktur di beberapa daerah menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program, terutama untuk kegiatan yang membutuhkan akses langsung ke daerah-daerah terpencil. Hal ini berdampak pada keterlambatan distribusi materi sosialisasi dan pelatihan.
- 3) Dinamika Sosial dan Politik: Dinamika sosial dan politik yang berubah cepat di tingkat lokal juga turut memengaruhi pelaksanaan program. Ketegangan politik menjelang pemilu, misalnya, sempat mengganggu beberapa inisiatif yang melibatkan berbagai pihak dan menyulitkan kolaborasi lintas sektor.

Secara keseluruhan, program-program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan

kesatuan dan partisipasi politik masyarakat. Meskipun demikian, keberhasilan ini tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya, pendanaan, dan infrastruktur. Ke depan, diharapkan adanya evaluasi lebih mendalam dan penyempurnaan strategi dalam merancang dan melaksanakan program-program yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran guna mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka tercapainya sasaran strategis yang telah diuraikan diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 6 Program, 13 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran APBD murni Tahun 2024 sebesar Rp. 111.790.539.544,- dan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 124.013.959.017,- sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi	:	Rp.	122.483.626.917,86,-
Belanja Pegawai	:	Rp.	6.527.073.135,86,-
Belanja Barang dan Jasa	:	Rp.	13.483.220.994,00,-
Belanja Hibah	:	Rp.	102.473.332.788,00,-
Belanja Modal	:	Rp.	1.530.332.100,00,-
Total Jumlah Pagu	:	Rp	124.013.959.017.86,-

Realisasi Penggunaan Anggaran dengan mengacu pada Target Kinerja Renstra ditunjukkan pada Tabel Berikut:

Tabel 3.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp	
Mewujudkan Kondusifitas Daerah melalui Penguatan Ideologi Politik Sosial Budaya (IPOLEKS OSBUD) ”													124.013.959.017		121.579.323.000.		102,003	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66,00							12.041.467.879	0,00	10.479.105.628	0,00	114,9093091	
							Perencanaan, Pengan	Nilai SAKIP	80,00				472.898.200	6	389.145.21033	1333,	121,52	



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
							ggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangk at Daerah	Perangk at Daerah									
										Penyusuna n Dokumen Perencana a n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok um en	18.922.400 ,00	4 Doku men	14.872.250	150	127,23
										Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lapo ran	75.352.800 ,00	1 Lapor an	66.041.900	100	114,09



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaera h	1 Lapo ran	378.623.000 ,00	1 Lapo ran	308.231.060	100	122,83
							Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Persent ase Realisas i Anggaran	97,50%				7.834.924.7 85	17,28	6.399.735.7 201	564,2 36111	122,42 57552
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Oran g/ Bulan	6.255.393.1 35,00	8 Oran g/ Bulan	4.832.843.4 55	150	129,43 50457
										Penyediaa n Administra si Pelaksanaa n Tugas ASN Pelaksana an Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaa Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	1 Dok um en -	1.491.155. 000,00 -	2 Doku men -	1.480.840. 000 -	50 -	100,69 65641 -



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
										Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
										Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lapo ran	88.376.650, 00	1 Lapor an	86.052.265	100	102,701 1317
										Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	- -	-	- -	-	-	-
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Sem esteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	- -	-	- -	-	-	-
										Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan	- Dok um en	-	- -	-	-	-



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGARAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikator Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp	
										Realisasi Anggaran	Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
							Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Laporan				129.962.800	0,00 Laporan	120.922.911	-!	107,4757	
										Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1.436.150,00	0,00 Laporan	-	-	-	
										Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	93.172.400,00	0,00 Laporan	90.505.661	-	102,9464886	



Tujuan	Sasaran Strategis			Progr am			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikat o r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp	
										Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lapo ran	35.354.250,00	0,00 0	30.417.250	-	116,230 9216	
							Adminis trasi Kepega waian Perangk at Daerah	Indeks Kepua s an Masya r akat	89					52.254.600	82	52.224.000	108,5889 571	100,058 5938
										Pengadaan Pakaian Dinas Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapa	1 Paket	52.254.600	1 Pake t	52.224.000	100	100,058 5938	
							Adminis trasi Umum Perangk at Daerah	Jumlah Laporan Penyedi aan Baran g dan Jasa	6 Lapo ran				789.189.461	3 Lapo ran	780.092.515	200	101,166 1368	



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener Angan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Paket		- Paket	-	-	-
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkap n Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lapora n	22.490.271, 00	1 Laporan 0,00	22.490.271	-	100
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa N	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Pak et	70.008.200, 00	1 Paket	69.945.820	100	100,089 1833
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Lapora n	45.400. 000 ,00	1 Laporan	39.770.000	100	114,156 3993



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGARAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikator Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp	
										Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	59.000.000,00	1 Laporan	58.900.000	100	100,1697793	
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	592.290.990,00	0 Laporan	588.986.424	100,00	100,00	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemer	6 Laporan				1.530.332.100	0 Laporan	1.513.240.000	-	101,1295036	



Tujuan	Sasaran Strategis			Progr am			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp	
										Pengadaan Kendaraan Dinas Peroranganl Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Unit	-	- Unit	-	-	-	
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	408.086.900	9 Unit	405.350.000	222, 22	100,67	
										Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	127.662.000	1 Unit	125.700.000	100	101,560 8592	
							Penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah	Jumlah laporan Penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan Pemer	3 Laporan				305.825.933	6 Lapor an	299.522.945	50	102,104 3423	



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikat o r	Targ et 202 4	Uraian	Indikato r	Targ et 20 24	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
								ntahan Daerah									
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lapo ran	132.752.000	6 Lapor an	127.587.262	16,66	104,04
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lapora n	141.653.933	0 Lapor an	140.515.683	0	100,810 1
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lapo ran	31.420.000	1 Lapor an	31.420.00 0	100	100
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerin tahan Daerah	Jumlah laporan Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemer intahan Daerah	3 Lap ora ng				926.080.000	32 Lapo ran	924.222.327	9,375	100,20



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGARAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikator Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	876.820.000,00	24 Unit	876.022.327	133,33 33333	100,091 0562
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	49.260.000,00	8 Unit	48.200.000	750	102,199 2
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	- Unit	-	- Unit	-	-	-
	Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persepsi Masyarakat yang Paha	60 % (Dari Target 1.540 Orang Masyarakat)										4.227.648.825	1,39%	4.143.529.212	4329,0 04329	102,030 1441



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
		m terha dap Ideol ogi Panca sila dan Kara kter Keba ngsaa n	dalam 5 Tahun)														
				PROGRA M PENGUAT AN IDEOLOGI PANCASI LA DAN KARAKTE R KEBANG SAAN	Persent ase Genera si Muda yang diberik an Pemah aman Ideolog i Pancasi la dan Karakte r Kebab saan	60 % (Dari Target 1.540 Orang Masya rakat dalam 5 Tahu)							4.227.648.8 25	1,39	4.143.529.2 12	4329,0 04329	102,030 1441



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
							Perumu san Kebijak an Teknis dan Pemant apan Pelaksa naan Bidang Ideologi Pancasil a dan Karakter Kebang saan	Jumlah Dokumen Kegiata n Penguatan Ideologi Panca sila dan Karakte r Kebang saan	5 Dok ume n				4.227.648.825	4 Doku men	4.143.529.212	125	102,03
										Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Doku men	2.977.848.250,00	1 Dokum en	2.911.467.017	100	102,279 9926



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
										Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan	100 Orang	620.189.650 ,00	125 Oran g	607.622.642	80	102,06
										Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 Orang	274.962.60 0,00	0,00 Orang	270.953.450	-	101,47



Tujuan	Sasaran Strategis			Progr am			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp	
										Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan d Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	313.042.450,00	2 Laporan	312.380.228	200	100,2119923	
										Pembentukan Dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingna Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam, Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat	50 Keluarga	41.605.875,00	50 Keluarga	41.105.875	100	101,21	



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Targ et 202 4	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp	
										Kehidupan Bermasyaraka t, Berbangsa Dan Bernegara	Berbangsa, dan Bernegara							
				PROGRA M PEMBER DAYAAN DAN PENGAW ASAN ORGANIS ASI KEMASY ARAKATA N	Persent ase Ormas/ Anggot a Ormas di Sulawe si Tengah yang menda pat Pember dayaan dan Sosialis asi Keorma san	100 % (Dari Target 600 Orang Masya rakat dalam 5 Tahun)							41.130.800.138	0	40.413.150.390	33333,33	101,77	
							Perumu san Kebijak an Teknis dan	Jumlah Dokumen Kegiata n Pember dayaan dan	4 Doku men				41.130.800.138	66 Dokumen	40.413.150.390	6,060606061	101,7757827	



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
							Pemant apan Pelaksa naan Bidang Pember dayaan dan Pengaw asan Organis asi Kemasy arakata n Pengaw asan Organis asi Kemasy arakata n	Pengaw asan Organis asi Kemasy arakata n									
										Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaya an Ormas Evaluasi,	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Lapo ran	40.181.733.788	0 Lapo ran	39.496.192.000	0	101,735 7162



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
										dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	yang Disusun						
										Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaya an Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan, Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60 Orang	607.100.350,00	160 Orang	595.144.639	37,5	102,008 8749
										Pelaksanaan Koordinasi dibidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi	60 Orang	79.300.950,00	0 Orang	75.386.189	0	105,19 29419



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
										Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						
										Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, , Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	262.665.050,00	2 Laporan	246.427.562	200	106,589 1526



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
				PROGRA M PEMBINA AN DAN PENGEM BANGAN KETAHAN AN EKONOMI , SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Masyarakat yang memah ami aspek- aspek Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	60 % (Dari Target 600 Orang Masya rakat dalam 5 Tahun)							603.709.475	0,45	576.673.708	13333,33333	104,688 226



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
							Perumu san Kebijak an Teknis dan Pemant apan Pelaksa naan Bidang Ketahan an Ekonom i, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokum en Pembin aan dan Pengem bangan Ketaha nan Ekonom i, Sosial dan Budaya	3 Dokum en				603.709.475	5 Dokum en	576.673.708	60 226	104,688
										Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgun aan Narkotika, Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	60 Orang	115.960.200 ,00	75 Orang	108.642.700	80	106,735 3812



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
										Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
										Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60 Orang	132.957.300,00	0 Orang	131.743.900	0	100,9210294



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
										Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Lapo ran	354.791.975,00	1 Lapo ran	336.287.108	400	105,502 6989
				PROGRA M PENINGK ATAN KEWASP ADAAN NASIO NA L DAN	Persent ase Masyar akat yang memah ami	60 % (Dari Target 1.400 Orang Masya							1.912.296.250	1,53 %	1.907.661.139	3921,5 68627	100,242 9735



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp	
				PENINGK ATAN KUALITA S DAN FASILITA SI PENANG ANAN KONFLIK SOSIAL	aspek- aspek Kewasp adaan Dini di Daerah	rakat dalam 5 Tahun)												
							Perumu san Kebijakan Teknis dan Pelaksa naan Pemant apan Kewasp adaan Nasiona l dan Penang anan Konflik Sosial	Jumlah Dokum en Pemant apan Kewasp adaan Dini Masyar akat di Daerah	5 Doku men				1.912.296.250	6 Doku men	1.907.661.13 9	83,333 33333	100,242 9735	
										Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama							



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
										Kewaspadaa n Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaa n Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah	Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Doku men	88.030.850	1 Lapor an	346.418.511	100	95,6737 7
										Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaa n Dini, Kerja	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	13 Oran 0 g	133.038.750, 00	0 Oran g	125.400.841	#DIV/0 !	106,090 8



Tujuan	Sasaran Strategis			Progr am			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
										sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaa n Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
										Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	150 Orang	290.868.650, 00	75 Orang	286.564.454	200	101,502
										Pemantauan							



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
										Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaa n Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaa n Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
										Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pelaporan di	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	4 Lapo ran	303.265.700, 00	4 Lapo ran	302.984.620	100	100,092 77



Tujuan	Sasaran Strategis			Progr am			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
										Bidang Kewaspadaa n Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaa n Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaa n Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
										Pelaksanaa n Forum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	4 Lapo ran	853.691.500, 00	1 Lapor an	846.292.713	400	100,874 26
										Koordinasi Pimpinan							



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
										Dae rah Prov insi	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi						
	Menin gkatnya Pendid ikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilit asi Partai Politik	Indeks Demo krasi Indon esia (IDI)	77,10 (Target IKU)										64.098.036.4 50	79,35	61.321.500.5 56	102	95,66
				PROGRA M PENINGK ATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIK AN	Persent ase Masyar akat yang memah ami aspek- aspek Indeks Demok	60 % (Dari Target 800 Or ang Masya rakat dalam 5 Tahun)							64.098.036.4 50	100	61.321.500.5 56	166	95,66



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGARAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikator Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
				MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	rasi Indonesia (IDI)												
							Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksnaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	4 Dokumen				64.098.036.450	4 Dokumen	64.059.202.923	100	100,060 6213



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Targ et 202 4	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
							Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										
										Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	1 Laporan		2 Laporan		50	100,0288481
													62.573.395.400		62.555.349.400		



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
										Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun						
										Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	40 Orang	746.342.050,00	290 Orang	727.283.640	13,7931	102,62



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGG A RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
										Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaa n Pemerintaha n, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemil ihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun						
										Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaa n Pemerintaha n, Perwakilan, dan Partai	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	150 orang	235.562.7 00,00	150 Orang	234.064.9 00	100	100,64



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
										Politik, Pemilihan Umum/Pemil ihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						
										Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaa n Pemerintaha n, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemil ihan Umum	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Lapo ran	542.736.300 ,00	2 Lapor an	542.504.983	200	100,043



Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			PAGU ANGGA RAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
	Uraian	Indikat or Kinerja	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikato r	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2024	Rp	K	Rp	K	Rp
										Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
Total Jumlah Anggaran													124.013.959.017		121.579.323.000		102,00

3.3. Inovasi

Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah masih sebatas google form yang digunakan dalam kegiatan internal Organisasi dalam pelaksanaan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari sebagai berikut:

3. Sistem Informasi Layanan Dan Database Ormas

<https://siladmas.bakesbangpol.sultengprov.go.id/>



SILADMAS merupakan platform berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data dan informasi terkait organisasi kemasyarakatan (ORMAS) di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui SILADMAS diharapkan akan tercipta sistem yang terintegrasi dan terpusat untuk memantau, mengelola, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan serta informasi terkait ORMAS secara lebih efektif dan efisien. Pembuatan SILOMAS ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta dalam menjaga stabilitas dan kedamaian di tengah-tengah pluralitas dan keragaman sosial masyarakat. pembuatan SILADMAS ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat peran dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan berbudaya. Selain itu, pengembangan SILOMAS juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JLN. TANJUNG API NO. 7PALU TELP/FAX (0451)-421954 - 453350
WEBSITE : www.Bakesbangpol.sultengprov.go.id email: Kesbangpolsultengprov@gmail.com
PALU - SULAWESI TENGAH 94112

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 000.9.6/1482 /SET.BKBPD

TENTANG
PENETAPAN SISTEM INFORMASI LAYANAN DAN DATA BASE ORMAS
(SILADMAS)
SEBAGAI INOVASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : Bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan yang lebih efektif dan efisien terhadap Ormas di Sulawesi Tengah, maka perlunya menetapkan Inovasi Sistem Informasi Layanan dan Data Base Ormas (SILADMAS) sebagai inovasi Perangkat Daerah beserta Tim inovasinya yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Inovasi Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- Memperhatikan : Pedoman Umum Penilaian dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN SISTEM INFORMASI LAYANAN DAN DATA BASE ORMAS SEBAGAI INOVASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
- PERTAMA : Menunjuk nama-nama Tim pengelola inovasi SILADMAS sebagaimana tersebut pada kolom 2 dan disertai tugas sebagaimana disebut pada kolom 4 daftar lampiran-1 Keputusan ini;

KEDUA

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 000.9.6/1402 /SET.BKBPD
TANGGAL : 10 APRIL 2023

TIM PENGEMBANGAN INOVASI SILADMAS

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dra. Novalina wiswadewa, MM	Sekretaris Provinsi	Penanggung jawab
2	Drs. Arfan, M.Si	Kepala Bakesbangpol	Ketua
3	I Wayan Yudana, AP, M.Si	Sekretaris Bakesbangpol Prov Sulteng	Koordinator Pengembangan
4	Rustam Aripuddin, S.Ag, M.Si	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Anggota
5	Kristo Suryanto Tumakaka, S.Sos	Kepala Bidang Politik	Anggota
6	Andi Musdalifa, S.Pd, M.Si	Kepala Bidang Kewaspadaan	Anggota
7	Dody Setiawan, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Ekososbud, Agama dan Kemasyarakatan	Anggota

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ARFAN

- KEDUA : Menunjuk nama-nama Tim pengembangan inovasi SILADMAS sebagaimana tersebut pada kolom 2 dan disertai tugas sebagaimana disebut pada kolom 4 daftar lampiran-2 Keputusan ini;
- KETIGA : Menunjuk nama-nama Tim koordinasi komunikasi inovasi SILADMAS sebagaimana tersebut pada kolom 2 dan menjalankan fungsi koordinasi sesuai tugas jabatan sebagaimana disebut pada kolom 3 daftar lampiran-3 Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran kegiatan Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 000.9.6/1482/SET.BKBPD
TANGGAL : 10 April 2023

TIM PENGELOLA INOVASI SILADMAS

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dra. NOVALINA WISWADEWA, MM	Sekretaris Provinsi	Penanggung jawab
2	Drs. A R F A N, M.Si	Kepala Bakesbangpol	Ketua
3	I WAYAN YUDANA, AP, M.Si	Sekretaris Bakesbangpol	Koordinator
4	DODY SETIAWAN, S.STP, M.A.P	Kepala Bidang Ekososbud Kemasyarakatan dan Agama	Sub Koordinator Riset
5	APRIANI YERLIN	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
6	TRI HARPALA	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7	MARTHIANA LAHAY	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8	TOGAR MULYA PRABOYO SIAHAAN S.Kom	PHL	Anggota
9	CAHYANI	PHL	Anggota
10	ANDI MUSDALIFAH, S.Pd. SH. M.Si	Kepala Bidang Kewaspadaan	Sub Koordinator Inovasi
11	MOHOMAD RIZAL, S.Sos M.Si	Analisis Kebijakan	Anggota
12	ANDI MUHAMMAD AKBAR	PHL	Anggota
15	RUSTAM ARIPUDDIN, S.Ag, M.Si	Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan	Sub Koordinator Teknologi
16	IRFAN LIBUKA, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
17	TONNY JANTJE, A.Md	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
18	MUHAMMAD IFDAL, SE	PHL	Anggota
19	KRISTO SURYANTO TUMAKAKA, S.Sos	Kepala Bidang Politik	Sub koordinator tata usaha
20	YULIANTI, S.SoS	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
21	DEDDY FARDIAZ YINATA, SH	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
22	EDWIN ARIL S.A.P	PHL	Anggota
27	ERNI, SH. MAP	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Sub Koordinator Publikasi
28	MOHAMMAD SYAFRI, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
29	SURIYATI, SE	PHL	Anggota
30	GAZI AFIF	PHL	Anggota

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 000.9.6/1482 /SET.BKBPD
TANGGAL : 10 APRIL 2023

TIM KOORDINASI DAN KOMUNIKASI INOVASI SILADMAS

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Dra. Novalina wiswadewa, MM	Sekretaris Provinsi
2	Drs. Arfan, M.Si	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi
3	Dody Setiawan, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
4	Wahyu Agus Pratama, S.S.T.P., M.AP	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika (APTIKA)Dinas KOMINFO
5	Ahfan Halim, S.E., M.Si	Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Prov Sulteng
6	Muhammad Husni Pettawali, S.STP, M.Si	Kabag Pemerintahan pada Pemerintahan dan Otonomi Daerah
7	Esti Nuriani, SH., MH	Kabag Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum
8	Moh Icsan	Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman pada Satpol PP Prov Sulteng

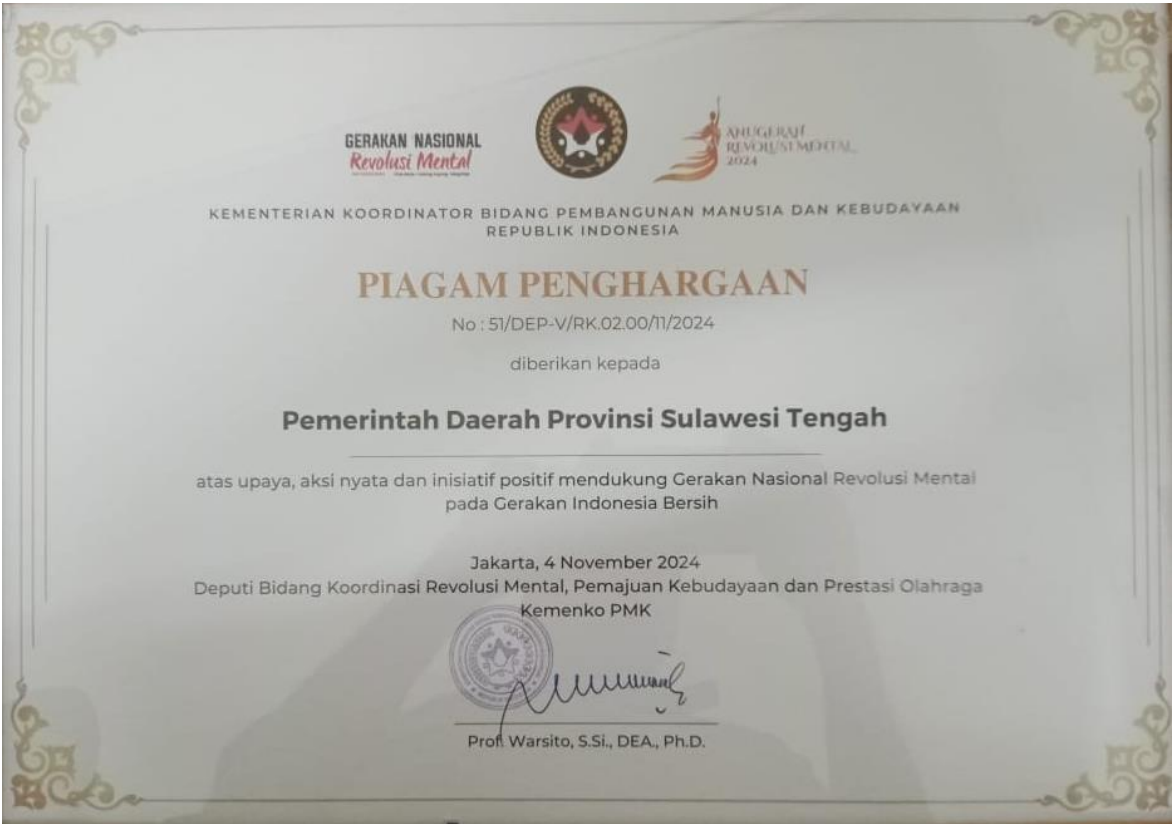
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



ARFAN

- 4. situs resmi website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah <https://www.bakesbangpol.sultengprov.go.id/>,
- 5. youtube bakesbang sulteng <https://www.youtube.com/bakesbangpolsulteng>,
- 6. facebook bakesbangpolsulteng <https://www.facebook.com/bakesbangpolsulteng>
- 7. Instagram bakesbangpolsulteng @Bakesbangpol.sulteng

3.4. Penghargaan



narasi



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum

Secara Umum dapat di simpulkan bahwa dari sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang di tetapkan dalam penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2024, realisasinya adalah sebagai berikut : Sebanyak 1 (satu) sasaran telah mencapai target yang di tetapkan yaitu :

1. Sasaran strategis “Meningkatnya Penerapan hasil pembinaan, Kebebasan, Kesenjangan dan Kapasitas lembaga Demokrasi”, dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia belum dapat terukur, dikarenakan dikeluarkan oleh BPS, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu penunjang dalam mencapai target yang ditetapkan.
2. Dalam Realisasi Anggaran Tahun 2024, proses perencanaan penyusunan dan pelaporan anggaran mengalami peningkatan, sehingga realisasi keuangan atau penyerapan menjadi lebih baik.

Langkah kedepan dalam meningkatkan kinerja adalah :

1. Peningkatan Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dilakukan diawali dengan perbaikan pada perencanaan kegiatan, perbaikan secara mendalam pada proses perencanaan yaitu mencakup pemanfaatan data data laporan realisasi kegiatan sebelumnya dan hasil survei kepuasan masyarakat dalam pelayanan pada periode tahun sebelumnya agar pihak Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Tengah dapat mengetahui letak kurang efisien dan efektifnya pelaksanaan kegiatan baik dari kinerja fisik maupun keuangan. Serta melakukan analisis swot yaitu mencari tau letak kekuatan dan kelemahan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan program.
2. Menyusun Kegiatan dan Program Yang berorientasi pada hasil setiap program yang dirancang pada badan kesatuan bangsa dan politik daerah provinsi Sulawesi tengah harus dapat diukur dengan jelas dengan melihat beberapa aspek yaitu program yang telah disusun harus relevan dengan permasalahan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah, kegiatan yang direncanakan harus sesuai

dengan kapasitas lembaga dan sumber daya yang tersedia serta memperhatikan efektivitas anggaran dan menghindari pemborosan. Dan kegiatan yang ada harus sinkron dengan RPJMD maupun RPJMN

3. Memanfaatkan teknologi informasi baik dalam penunjang urusan opd maupun pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan.
4. Melakukan evaluasi berkala pada kegiatan kegiatan yang telah rencanakan agar fungsi control tetap berjalan dan pelaksanaan kegiatan dapat dimaksimalkan.

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA

**PERJANJIAN KINERJA ESELON II
BAKESBANGPOL PROV. SULTENG
TAHUN 2024**



**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. Arfan, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dra. Novalina, MM**
Jabatan : Pjs. Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 NOVEMBER 2024

PIHAK KEDUA,
Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH


Dra. NOVALINA, MM

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH


Drs. ARFAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710909 199012 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penerapan hasil pembinaan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks demokrasi Indoneia (IDI)	77,10 (Indeks)

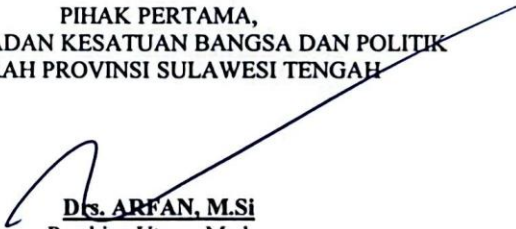
Program	Anggaran	Keterangan
1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 4,227,648,825	APBD - P
2. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 64,098,036,450	APBD - P
3. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 1,912,296,250	APBD - P
4. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 41,153,800,138	APBD - P
5. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp 603,709,475	APBD - P
6. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 12,018,467,880	APBD - P

Palu, 11 NOVEMBER 2024

PIHAK KEDUA,
Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH


Drs. NOVALINA, MM

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


Ds. ARFAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710909 199012 1 001

**PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BAKESBANGPOL PROV. SULTENG
TAHUN 2024**



**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Wayan Yudana, AP, M.Si
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. A r f a n, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA.

Drs. A R F A N, M.Si

Palu, 12 November 2024
PIHAK PERTAMA,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program/keg/sub.keg	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Sasaran Program Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks RB Perangkat Daerah	68,50
	Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan	Nilai SAKIP Perangkat daerah	80
	Sasaran Sub. Kegiatan - Tersusunnya dokumen renja - Tersusunnya laporan RKPD - Tersusunnya dokumen RKA - Tersusunnya dokumen DPA - Tersusunnya dokumen RKA-P - Tersusunnya dokumen DPA-P - Tersusunnya dokumen Peta Proses Bisnis - Tersusunnya dokumen Manajemen Resiko - Tersusunnya dokumen Lakip - Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Terevaluasinya Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen renja - Jumlah laporan RKPD - Jumlah Dokumen RKA - Jumlah dokumen DPA - Jumlah dokumen RKA-P - Jumlah dokumen DPA-P - Jumlah dokumen Peta Proses Bisnis - Jumlah dokumen Manajemen Resiko - Jumlah dokumen Lakip - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen 1 laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 laporan 1 laporan
	Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	60
	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik perangkat daerah	Indeks pelayanan publik (IPP) Perangkat Daerah	60
	4. Meningkatnya pengawasan kearsipan internal perangkat daerah	Tingkat digitalisasi arsip perangkat daerah	62
	5. Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP)	TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	60
	6. Meningkatnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	60
	7. Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & Jasa secara elektronik Perangkat Daerah	Indeks Tata kelola PBJ Perangkat Daerah	60
	8. Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60

PROGRAM/KEG/SUB.KEG	ANGGARAN		KETERANGAN
I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	12,018,467,879.86	APBD-P
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	472,898,200	
- Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	18,922,400	
- Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp.	75,352,800	
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	378,623,000	
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	52,254,600	
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	789,189,461	
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	305,825,933	
5. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	8,264,194,785.86	
6. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	129,962,800	

7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	1,078,062,100
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	926,080,000

Palu, 12 November 2024

**PIHAK KEDUA**
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
DR. ARFAN, M.Si

**PIHAK PERTAMA**
SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
I WAYAN YUDANA, AP, M.Si



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Kristo Suryanto Tumakaka, S.Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. A r f a n, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA

Drs. A R F A N, M.Si

Palu, 12 November 2024
PIHAK PERTAMA

KRISTO SURYANTO TUMAKAKA, S.Sos

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

	Sasaran Program/Keg/Sub.Keg	Indikator Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)
I	SASARAN PROGRAM Meningkatnya literasi Politik bagi Masyarakat	persentase kelompok masyarakat yang meningkat literasi politik	60%
	SASARAN KEGIATAN 1. Meningkatnya pemahaman politik masyarakat	1. Persentase meningkatnya pemahaman politik bagi parpol 2. Persentase meningkatnya pemahaman politik bagi Ormas 3. Persentase meningkatnya pemahaman politik bagi Pemilih pemula	60% 60% 60%
	SASARAN SUB. KEGIATAN - Tersosialisasinya peraturan perUndang-Undangan bidang politik bagi Partai Politik - Tersosialisasinya Pemantapan Etika Budaya Politik bagi Partai Politik, dan Kelompok Masyarakat	- Jumlah peserta sosialisasi Peraturan PerUndang-Undagan Bidang politik bagi Partai Politik - Jumlah Peserta sosialisasi Pemantapan Etika budaya politik bagi Partai Politik dan Kelompok Masyarakat	40 orang 150 orang
	SASARAN KEGIATAN 1. Meningkatnya pemahaman peran perempuan dalam politik	1. Persentase meningkatnya pemahaman politik bagi organisasi dan kelompok perempuan	60%
	- Tersosialisasinya Pendidikan Politik bagi Organisasi/Kelompok Perempuan - Terpenuhinya Kebutuhan pendanaan Partai Politik - Terpenuhinya Kebutuhan pendanaan Pelaksanaan Pemiluakada - Termonitoringnya dan terevaluasinya situasi perkembangan politik daerah Kab/Kota	- Jumlah Peserta Organisasi/Kelompok Perempuan yang mendapatkan sosialisasi pendidikan politik - Jumlah partai politik penerima bantuan Keuangan - Jumlah lembaga penerima dana hibah penyelenggaraan pemiluakada - Jumlah Kab/kota yang dimonitoring dan evaluasi	180 org 11 parpol 4 lembaga 13 kab/kota

PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I Program Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 64,098,036,450	APBD-P
1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi Politik.	Rp. 64,098,036,450	
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. 746,342,050	
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Rp. 235,562,700	
- Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Sub. Kegiatan Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Rp. 62,573,395,400	
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Rp. 542,736,300	

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Drs. A R F A N, M.Si

Palu, 7 November 2024
KEPALA BIDANG POLITIK
KRISTO SURYANTO TUMAKAKA, S.Sos



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rustam Aripuddin, S.Ag, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. A r f a n, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

- 1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
- 2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Drs. A R F A N, M.Si

Palu, 12 November 2024
PIHAK PERTAMA

RUSTAM ARIPUDDIN S.Ag, M.Si

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program/Keg/Sub.Keg	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Sasaran Program Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Masyarakat	persentase masyarakat yang mendapatkan layanan pembinaan Ideologi Pancasila dan wasbang	60%
	Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas pembinaan ideologi dan wasbang	Persentase SMA/SMK, Perguruan Tinggi dan Organisasi Kepemudaan yang terbina ideologi dan wasbang	60%
	Sasaran Sub.kegiatan - Terlatihnya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi	Jumlah Pelajar yang terseleksi dan diberikan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka	56 orang
	- Terbinanya masyarakat dalam rangkaian peringatan hari bela negara	Jumlah masyarakat yang mengikuti rangkaian peringatan hari bela negara	100 orang
	- Tersosialisasinya penguatan dan pemantapan ideologi pancasila terhadap generasi muda	jumlah peserta generasi muda yang mendapatkan sosialisasi penguatan dan pemantapan ideologi pancasila	60 orang
	- Tersosialisasinya Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pengembangan Karakter Bangsa terhadap generasi muda	Jumlah peserta generasi muda yang mendapatkan sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pengembangan Karakter Bangsa	60 orang
	- Terevaluasinya Pelaksanaan Program Penguatan Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang di evaluasi	4 kab/kota
	Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas pembinaan ideologi dan wasbang	Persentase Kelurahan yang terbina ideologi dan wasbang	60%
	Sasaran Sub. Kegiatan - Tersosialisasinya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengamalan pancasila dan penumbuhan karakter keluarga	Jumlah keluarga yang diberikan penguatan pentingnya kesadaran ideologi pancasila	10 kelurahan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 4,227,648,825	APBD-P
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 4,227,648,825	
- Sub. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 2,977,848,250	
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 620,189,650	
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 274,962,600	

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Rp. 313,042,450
- Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua Aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa, dan .. Rp. 41,605,875

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. A R F A N, M.Si

Palu, 22 November 2024

KEPALA BIDANG IDEOLOGI
DAN WAWASAN KEBANGSAAN



RUSTAM ARIPUDDIN, S.Ag, M.Si



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Andi Musdalifah, S.Pd. SH. M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. A r f a n, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

- 1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
- 2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Drs. A R F A N, M.Si

Palu, 12 November 2024
PIHAK PERTAMA

ANDI MUSDALIFAH, S.Pd. SH. M.Si

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program/Keg/Sub.Keg	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Sasaran Program		
	Meningkatnya kewaspadaan daerah	Persentase peningkatan kewaspadaan daerah dalam pencegahan konflik sosial	100%
	Sasaran Kegiatan		
	Meningkatnya kualitas pembinaan kewaspadaan daerah	Persentase peningkatan perangkat aparatur dan tokoh masyarakat yang terbina kewaspadaan daerahnya	100%
I	Sasaran Sub.Kegiatan		
	- Tersusunnya rekomendasi pemantapan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial	Jumlah rekomendasi pemantapan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial	1 Rekomendasi
	- Tersusunnya rekomendasi pemantauan orang asing dan lembaga asing di daerah (tim POALA)	Jumlah rekomendasi pemantauan orang asing dan lembaga asing di daerah (tim POALA)	1 Rekomendasi
	- Tersosialisasinya peningkatan kewaspadaan di wilayah perbatasan bagi aparatur, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda	Jumlah aparatur dan aparat keamanan serta para tokoh yang mengikuti rapat sosialisasi peningkatan kewaspadaan di wilayah perbatasan	75 orang
	- Tersosialisasi upaya pencegahan potensi konflik sosial menjelang pemilu/kada serentak	Jumlah peserta sosialisasi	75 orang
	- Tersusunnya laporan pelaksanaan rapat Forum Pimpinan daerah provinsi (Forkopimda)	Jumlah laporan pelaksanaan rapat Forum Pimpinan daerah provinsi (Forkopimda)	4 laporan
	- Terdatanya perkembangan situasi dan kondisi kab/kota di Sulawesi Tengah	Jumlah dokumen data perkembangan situasi dan kondisi kab/kota di Sulawesi Tengah	13 dokumen
	- Tersedianya dokumen rencana aksi daerah penanganan konflik sosial (RAD-PKS) tahun berjalan	Jumlah dokumen RAD-PKS	1 dokumen
	- Terevaluasinya pelaksanaan RAD PKS tingkat Prov.Sulteng	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan RAD PKS	3 laporan
	- Tersusunnya kesepakatan tim terpadu pencegahan dan penanganan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme (RAD-PE)	Jumlah laporan hasil rapat TIMDU RAD-PE	1 Dokumen
	- Tersusunnya kesepakatan tim terpadu pencegahan paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme	Jumlah laporan hasil rapat TIMDU pencegahan paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme	3 laporan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1,912,296,250	APBD-P
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1,912,296,250	
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 133,038,750	
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Rp. 290,868,650	

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Rp. 853,691,500
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Rp. 303,265,700
- Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Rp. 331,431,650

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. A R F A N, M.Si

Palu, 12 November 2024
KEPALA BIDANG KEWASPADAAN



ANDI MUSDALIFAH, S.Pd. SH. M.Si



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dody Setiawan, S.STP., M.AP**
Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan
Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. A r f a n, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

- 1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
- 2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Drs. A R F A N, M.Si

Palu, 12 November 2024
PIHAK PERTAMA

DODY SETIAWAN, S.STP., M.AP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program/Keg/Sub.Keg	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	<i>Sasaran Program</i> Meningkatnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan	Persentase Organisasi Masyarakat yang aktif	100%
	<i>Sasaran Kegiatan</i> Meningkatnya kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat	Persentase organisasi kemasyarakatan yang terbina	100%
	<i>Sasaran Sub. Kegiatan</i> - Terpenuhinya Kebutuhan pendanaan organisasi masyarakat - Tersosialisasinya Isu-isu strategis ormas menjelang pilkada	Jumlah ormas penerima dana hibah Jumlah anggota ormas yang mengikuti sosialisasi	4 Ormas 60 orang
	- Rapat Tim terpadu Pengawasan Ormas - Terverifikasinya usulan dana hibah ormas	Jumlah laporan dari hasil pengawasan Organisasi/Kelompok masyarakat Persentase usulan dana hibah ormas yang diverifikasi	1 laporan 100%
	- Tersusunnya Rekomendasi terkait pemberdayaan dan pengawasan ormas - Terevaluasinya pelaporan organisasi kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi terkait pemberdayaan dan pengawasan ormas Jumlah ormas yang terevaluasi	1 Rekomendasi 4 Ormas
	<i>Sasaran Program</i> Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat mengenai ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	persentase kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya mengenai ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	60%
II	<i>Sasaran Kegiatan</i> Meningkatnya kualitas pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya terhadap masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang terbina ketahanan ekonomi	60%
	<i>Sasaran Sub. Kegiatan</i> - Tersosialisasinya kebijakan pemberdayaan ekonomi bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pemberdayaan ekonomi bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif	60 orang
	<i>Sasaran Kegiatan</i> Meningkatnya kualitas pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya terhadap masyarakat	Persentase sekolah yang terbina ketahanan sosial dan budaya	60%
	- Tersosialisasinya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi masyarakat - Terevaluasinya hasil pembinaan dan pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya di kabupaten Kota	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Jumlah laporan pelaksanaan	60 orang 4 Laporan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 41,153,800,138	APBD-P
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 41,153,800,138	
- Sub. Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Rp. 40,204,733,788	
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 607,100,350	

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp. 79,300,950
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Rp. 262,665,050

II Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Rp. 603,709,475 APBD

- 2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Rp. 603,709,475
 - Sub. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Rp. 115,960,200
 - Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Rp. 132,957,300
 - Sub. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah. Rp. 354,791,975

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. A R F A N, M.Si

Palu, 12 November 2024
KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI,
SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN

DODY SETIAWAN, S.STP., M.AP

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
BAKESBANGPOL PROV. SULTENG
TAHUN 2024**



**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Moh. Arief Rakhman, SE., M.Si**
Jabatan : Ka. Sub. Bagian Keuangan dan Asset
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **I Wayan Yudana, AP, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA
I WAYAN YUDANA, AP, M.Si

Palu, 12 November 2024


PIHAK PERTAMA
MOH. ARIEF RAKHMAN, SE., M.Si

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub.Keg	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah ASN yang Terdistribusi Gaji dan Tunjangan	45 orang
	- Tersusunnya Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen
	- Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
	- Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan
	- Tersusunnya Laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah SKPD	- Jumlah Laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan
	- Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan
	- Tersedianya unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	- Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit
	- Tersedianya unit Mebel	- Jumlah unit Mebel yang di sediakan	40 unit
	- Tersedianya unit peralatan dan mesin lainnya	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit
	- Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit
	- Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit

SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
- Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 6,684,663,135.86	APBD- P
- Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 1,491,155,000	
- Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 88,376,650	
- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 93,172,400	
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 1,436,150	
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 35,354,250	
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp. 542,313,200	
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Rp. 127,662,000	
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 408,086,900	
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 876,820,000	
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 49,260,000	

SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si

Palu, 12 November 2024
KASUB. BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET

MOH. ARIEF RAKHMAN, SE., M.Si



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Erni, SH, M.A.P**
Jabatan : Ka. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **I Wayan Yudana, AP, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

- 1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
- 2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,12 November 2024


PIHAK KEDUA
I WAYAN YUDANA, AP, M.Si

PIHAK PERTAMA

ERNI, SH, M.A.P

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub.Keg	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya bagi ASN Perangkat Daerah	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	102 lembar
	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket
	- Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
	- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen
	- Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan
	- Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan
	- Tersedianya layanan telepon	- Jumlah Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Layanan Telepon	1 unit
	- Terpenuhinya Kebutuhan Air	- Jumlah Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Layanan Air	1 unit
	- Tersedianya Layanan Listrik	- Jumlah Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Layanan Listrik	1 unit
	- Tersedianya Layanan Internet	- Jumlah Unit Kerja Yang Terpenuhi Layanan Internet	3 unit
	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	1 paket
	- Tersedianya laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan

SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
- Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 52,254,600	APBD - P
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 22,490,271	
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 70,008,200	
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 45,400,000	
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 59,000,000	
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 592,290,990	
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 132,752,000	
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 141,653,933	
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 31,420,000	

SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA
DAK POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
AI WAZAN RUDANA, AP, M.Si

Palu 12 November 2024
KASUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

ERNI, SH, M.A.P

DOKUMENTASI KEGIATAN

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Giat forum komunikasi penanganan konflik sosial Kota palu



GIAT PENINGKATAN KEWASPADAAN WILAYAH PERBATASAN DI KAB. BANGGAI



GIAT FORUM TIM PEMANTAUAN ORANG ASING DAN LEMBAGA ASING DI PALU



GIAT FORUM KOMUNIKASI PENCEGAHAN FAHAM RADIKAL DI KAB POSO





**GIAT FORUM KOMUNIKASI PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAERAH PROV.
SULTENG DI KAB. MOROWALI TAHUN 2024**



GIAT RAKOR FORKOPIMDA PROVINSI, KAB/KOTA DAN FORKOPIMCAM SE-PROV. SULTENG DI KOTA PALU TAHUN 2024





RAPAT RENCANA AKSI DAERAH (RAD) TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TW I DI KOTA PALU



**RAPAT RENCANA AKSI DAERAH (RAD) TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL TW II DI KOTA PALU**



**RAPAT KOORDINASI FORUM KEWASPADAAN
DINI MASYARAKAT DI KOTA PALU**



**RAPAT FORKOPIMDA PROVINSI SULAWESI TENGAH BULAN FEBRUARI
TAHUN 2024 DI PALU**



**PELAKSANAAN RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
(FORKOPIMDA) PROVINSI SULAWESI TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2024**



**RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)
PROVINSI SULAWESI TENGAH TRIWULAN III TAHUN 2024**

